Rakyat Bengkulu

LAPORAN INVESTIGASI SURATKABAR TERBAIK IPMA 2020

RABU, 16 DESEMBER | TAHUN 2020 — Pilihan Utama — TERBIT 16

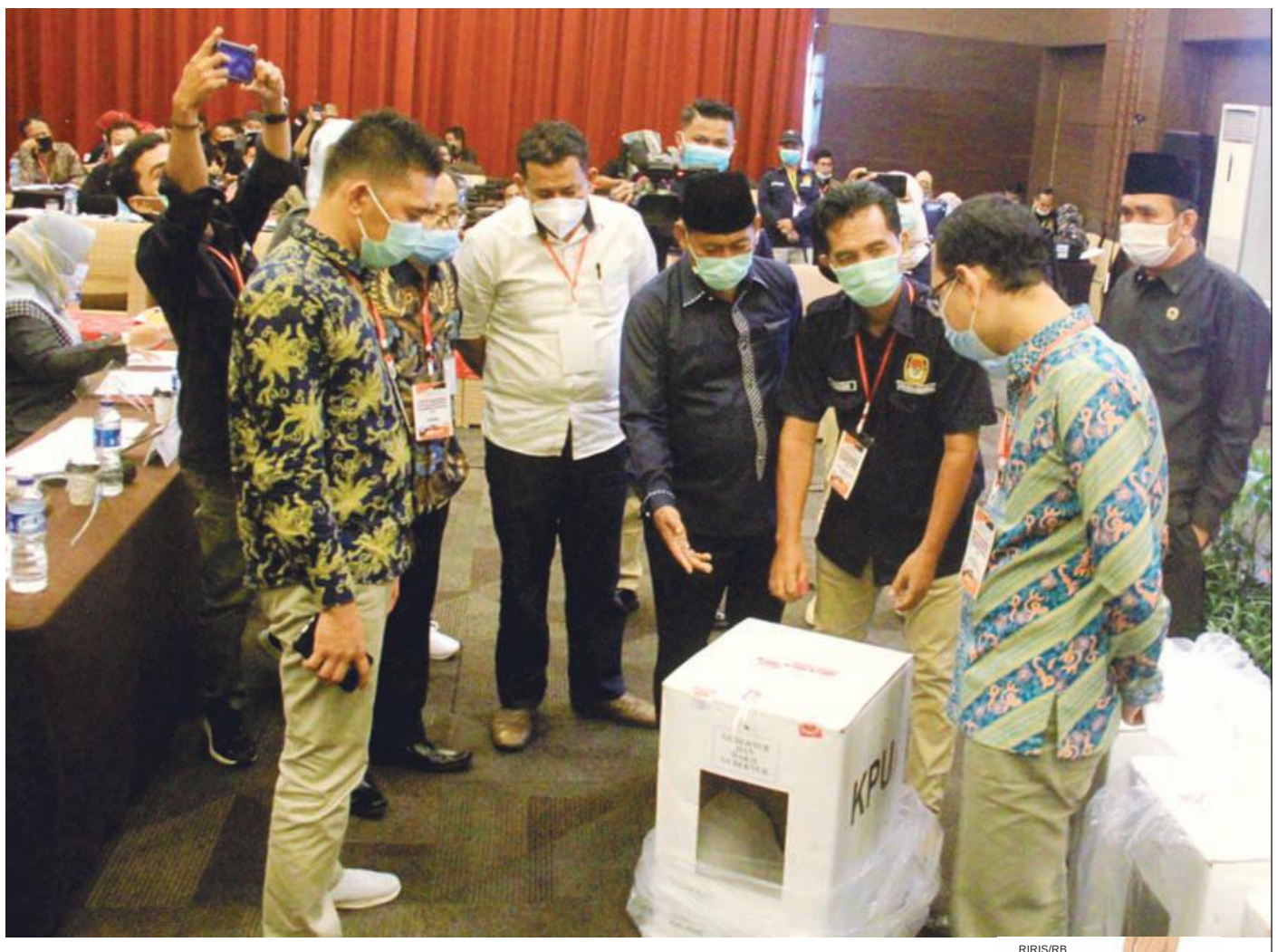

RIRIS/RB

REKAPITULASI: KPU Kota Bengkulu menggelar rapat pleno perhitungan perolehan suara Pilgub di Kota Bengkulu, kemarin.

Orang yang meninggal di rumah belum tentu terbebas dari Covid-19 karena kita tidak tahu. Jika dilakukan Swab semua yang meninggal akan ketahuan meninggal karena Covid-19 atau tidak. Itu penyebab angka kematian meningkat tahun ini,"

dr Lista Cerlyviera
Direktur RSHD Kota Bengkulu

Meningkat, Angka Kematian Tembus 1.838

BENGKULU - Di tengah pandemi Covid-19 ini, laporan angka kematian di Kota Bengkulu meningkat. Belum sampai di penghujung tahun 2020 sudah mencapai 1.838 kematian. Diantara peyebabnya kematian karena terpapar Covid-19.

Sedangkan tahun lalu, laporan angka kematian di Dinas Dukcapil Kota Bengkulu hanya 1.316. Belum genap setahun sudah terjadi peningkatan 554 angka kematian.

"Pelaporan kematian 2020 hampir 100 persen. Sekarang sudah menjadi keharusan melaporkan setiap kematian," terang Plt Kepala Dukcapil Kota Bengkulu Nofri Ardiyanto melalui Kabid Pencatatan Sipil Widodo.

▸ Baca **MENINGKAT...Hal 7**

HASIL REKAPITULASI SUARA PILGUB TINGKAT KABUPATEN/KOTA

KPU	HELMI-MUSLIHAN	ROHIDIN-ROSJONSYAH	AGUSRIN-IMRON ROSYADI
Mukomuko	34.727	38.972	20.528
Benteng	22.571	22.553	13.418
Lebong	14.006	33.620	15.073
Kepahiang	24.296	40.606	17.033
Rejang Lebong	42.816	63.343	34.109
Bengkulu Utara	45.839	48.785	48.980
Kota Bengkulu	63.882	47.498	37.793
Bengkulu Selatan	17.063	50.706	29.762
Seluma	39.168	37.720	33.674
Kaur	23.996	34276	17.946
Total	**328.364**	**418.079**	**268.316**

Pleno KPU Kabupaten/Kota Tuntas

Rohidin-Rosjonsyah Berjaya

Saksi Agusrin-Imron Minta PSU di 9 Kecamatan

BENGKULU - KPU Kabupaten dan Kota Bengkulu telah menyelesaikan rapat pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara Pilgub 2020. Terakhir KPU Kaur pukul 23.50 WIB tadi malam. Di sembilan kabupaten dan kota tersebut, sesuai dengan hasil polling RB Cagub dan Cawagub Rohidin Mersyah-Rosjonsyah berjaya.

▸ Baca **ROHIDIN...Hal 7**

PILKADA

KOPLI ANSORI - FAHRURROZI

Menang, Kopli-Rozi Tidak Bisa Digugat

LEBONG - Sama halnya dengan penginputan C1 KWK di laman Sistem Informasi Rekapitulasi Berbasis Elektronik (Sirekap). Dalam pleno rekapitulasi suara di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebong kemarin (15/12), perolehan suara pasangan calon (paslon) nomor urut 3, Kopli Ansori-Fahrurrozi (Kopli-Rozi) berhasil mengungguli 3 paslon lainnya. Atas hasil rekapitulasi itu, Kopli-Rozi ditetapkan KPU Lebong sebagai calon bupati (cabup) dan calon wakil bupati (cawabup) Lebong 2021-2024 terpilih dengan perolehan suara tertinggi mencapai 23.655 suara.

▸ Baca **MENANG...Hal 7**

Lawan SAHE Tolak Teken Berita Acara

CURUP – Rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara Kabupaten Rejang Lebong (RL), tadi malam tuntas dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten RL. Rapat Pleno dihadiri seluruh saksi masing-masing pasangan calon (paslon) yang bertarung di Pilkada Kabupaten RL.

▸ Baca **LAWAN...Hal 7**

RATNA DEWI PETTALOLO

Pelanggaran Politik Uang Mendominasi

175 Kasus Pilkada Antre di Bawaslu

JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) masih berupaya menuntaskan tanggungan kasus tindak pidana pemilihan (TPP) di pilkada. Maraknya pelanggaran yang terjadi membuat pengawas pemilu membutuhkan waktu ekstra untuk menuntaskan.

Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, hingga kemarin (15/12), pihaknya mencatat ada 175 kasus yang belum dituntaskan. Saat ini, kasus-kasus tersebut masih dalam pemeriksaan, baik di level kabupaten/kota maupun provinsi.

"Yang terbanyak politik uang 104 kasus," ujarnya kepada Jawa Pos kemarin. Jumlah tersebut naik dibanding 9 Desember lalu. Saat bertepatan hari coblosan, Bawaslu merilis hanya 76 kasus yang masih ditangani.

Selain politik uang, lanjut Dewi, pelanggaran atas pasal 88 Undang-Undang Pilkada tercatat sebanyak 21 kasus. Pasal tersebut melarang pejabat, aparat sipil negara, hingga pejabat desa/kelurahan untuk membuat kebijakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon.

▸ Baca **175...Hal 7**

Eceran Rp 6.000/eksemplar. Langganan Rp 165.000, luar kota tambah ongkos kirim

Rohidin-Rosjonsyah Berjaya

Sambungan dari halaman 1

Paslon dengan nomor urut 2 tersebut unggul dengan 418.079 suara. Di posisi kedua, Helmi Hasan-Muslihan DS 328.364 suara. Lalu Agusrin M Najamudin-Imron Rosyadi 268.316 suara. Rohidin menang telak di sejumlah kabupaten *(lihat grafis).*

Seperti hasil pleno yang digelar KPU Mukomuko kemarin, Rohidin-Rosjonsyah (R2) berhasil mengantongi 38.972 suara se-Kabupaten Mukomuko. Sedangkan diurutan kedua, ditempati Paslon 1, Helmi Hasan-Muslihan DS, mendapatkan sebanyak 34.727 suara. Paslon 03, Agusrin M. Najamudin-Imron Rosyadi meraih 20.528 suara.

"Sebagaimana kita ketahui bersama dan saksikan bersama tadi. Hasil Pleno rekapitulasi perolehan suara untuk Pilgub, diterima oleh semua saksi dari tiga Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu," kata Ketua KPU Mukomuko, Irsyad.

Dari hasil rekapitulasi itu, tidak ada perubahan untuk kecamatan yang dimenangkan. Baik oleh Paslon 02, maupun oleh Paslon 01. R2 berhasil menyapu bersih, dengan menang di 11 kecamatan. Yaitu di Kecamatan Air Dikit, Air Manjuto, Ipuh, Kota Mukomuko, Lubuk Pinang, Malin Deman, Penarik, Pondok Suguh, Teras Terunjam, V Koto dan XIV Koto.

Sedangkan Paslon 01, mampu unggul di 4 kecamatan. Yakni di Kecamatan Air Rami, Selagan Raya, Sungai Rumbai dan teramang Jaya. Sementara Paslon 03, kalah di seluruh kecamatan di Kabupaten Mukomuko. Dengan selisih suara cukup jauh dengan Paslon lainnya, terlebih lagi jika dibandingkan dengan paslon 02.

Meski Paslon 02 berhasil unggul, namun selisih suara dengan Paslon 01, terbilang tidak terlalu jauh. Paslon 02 hanya mampu lebih tinggi 4.245 suara. Berbeda dengan Paslon 03, ia kalah hingga 14.199 suara dari Paslon 01. Dan selisih hingga 18.444 suara, jika dibandingkan dengan perolehan suara Paslon 02.

"Pleno rekapitulasi perolehan suara Pilgub di Mukomuko, sudah tuntas. Selanjutnya ini akan kita bawa ke Provinsi, untuk pleno ditingkat KPU Provinsi Bengkulu," demikian Irsyad.

Pleno digelar di Aula Hotel Bumi Batuah. Hadir lima komisioner KPU Mukomuko, tiga komisioner Bawaslu Mukomuko dan seluruh PPPK se-Kabupaten Mukomuko. Juga hadir saksi dari masing-masing Paslon, serta pemantau.

Hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bengkulu di Kabupaten Kepahiang, pasangan nomor urut 02 Rohidi Mersyah – Rosjonsyah tampak sangat kokoh mendapatkan suara terbanyak di Kabupaten Kepahiang.

Ini terlihat dari hasil rekapitulasi ini, dimana pasangan R2 berhasil mendapatkan 40.606 suara, atau selisih 16.310 suara dibanding peraih suara terbanyak kedua, yakni pasangan nomor urut 01 Helmi – Muslihan dengan perolehan 24.296 suara. Sementara pasangan nomor urut 03 Agusrin Najamudin – Imron Rosyadi (disebut Air), hanya meraih 17.033 suara.

Minta PSU di 9 Kecamatan

Sementara itu, ada yang menarik dari pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat Gubernur di Bengkulu Utara (BU) kemarin. Meskipun meraih suara terbanyak, saksi Cagub Agusrin – Imron menolak menandatangani formulis C Hasil Pleno tingkat kabupaten. Padahal saksi mengikuti semua rangkaian pleno.

PERI/RB

TUNTAS: KPU Mukomuko melaksanakan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara Pilgub dan Pilbup, kemarin.

Bahkan Erwandi, S.IP saksi paslon Agusrin-Imron tersebut meminta KPU menetapkan Pemunguatan Suara Ulang (PSU) di 9 Kecamatan masing-masing Ketahun, Pinang Raya, Putri Hijau, Marga Sakti Sebelat, Ulok Kupai dan Napal Putih. Ditambah tiga kecamatan lagi masing-masing Padang Jaya, Air Padang dan Giri Mulya.

Menariknya, 6 Kecamatan tersebut adalah basis Rohidin Mersyah-Rosjonsyah yang meraih suara terbganyak. Sedangkan di tiga kecamatan lain Helmi Hasan-Muslihan meraih suara terbanyak. Di sembilan kecamatan tersebut total pasnagan Helmi – Muslihan meraih suara 26.164 dan pasangan Rohidin-Rosjonsyah meraih 32.553.

Sedangkan pasangan Agusrin-Imron hanya meraih total suara 18.570 di sembilan kecamatan tersebut. "Karena kami menilai banyak kejanggalan, sehingga kami meminta KPU menetapkan PSU di Dapil II dan IV (9 Kecamatan, red) untuk Pilgub," tegasnya.

Erwandi menuturkan, diantara kecurigaannya terkait adanya penggunaan surat suara untuk pemilih yang berstatus tambahan diluar surat suara tambahan. Ia juga menilai besarnya jumlah warga yang tidak memilih menjadi faktor kegagalan dalam sosialisasi.

"Selain itu juga banyaknya surat suara yang rusak. Ditambah lagi tingginya surat suara yang tidak sah yang mencapai 12.703 kami nilai menjadi sebuah kecurigaan," terangnya.

Ia menegaskan jika mereka memutuskan untuk tidak menandatangani formulir C Hasil pleno kemarin. Ia juga sudah mengisi formulir kejadian khusus dalam pleno tersebut.

"Kita sudah isi formulir kejadian khusus dan sudah kita serahkan dalam pleno kemarin. Selain memang kita tidak menandatangani formulir C hasil," pungkas Erwandi.

Terkait hal itu, Ketua KPU BU Suwarto, SH menuturkan jika pleno KPU dinilai sudah sangat sukses dan tidak ada hambatan. Terkait dengan adanya protes, ia menilai keberatan yang disampaikan saksi 03 dinilainya tidak berkaitan dengan proses rekapitulasi.

"Keberatan yang disampaikan tidak masuk dalam proses ataupun terkait dengan rekapitulasi. Terkait rekapitulasi tidak ada sanggahan ataupun perbedaan data perolehan suara dari ketiga saksi," terangnya.

Namun ia tetap akan menyampaikan hal itu dalam pleno KPU tingkat provinsi nantinya. Apalagi memang saksi sudah mengisi formulir kejadian khusus."Tetap akan kita bawa dan kita sampaikan dalam pleno tingkat provinsi nantinya," ujar Suwarto.

Dalam pleno kemarin, pasangan Agusrin – Imron meraih suara terbanyak dengan 48.980 suara, sedangkan terbanyak kedua diraih oleh pasangan Rohidin – Rosjonsyah dengan 48.785 suara. Sedangkan pasangan Helmi – Muslihan meraih suara paling sedikit dengan 45.839 suara. (qia)

Pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi jumlah suara di tingkat KPU Kota Bengkulu juga digelar kemarin. Saksi dari Pasangan nomor urut 1 Helmi-Muslihan tidak hadir. Ketua KPU Kota Bengkulu Martawansyah M.Si menyampaikan hal itu tidak menjadi masalah, pleno masih tetap bisa dilanjutkan. Yakni melaksanakan pleno terbuka, rekapitulasi suara hasil pleno tingkat PPK sebelumnya di Sembilan kecamatan.

"Dari tiga Paslon saksi Paslon 01 tidak hadir. Namun hal itu tidak menjadi masalah, pleno masih tetap bisa dilanjutkan dan sah, sebab saksi dari Paslon lainnya, Bawaslu sudah hadir mengikuti pelaksanaan pleno terbuka kita hari ini," kata Martawansyah.

Dijelaskannya, pihaknya telah menerima beberapa rekomendasi dari Bawaslu Kota Bengkulu. Diantaranya terkait pleno tingkat PPK, dimana ada beberapa kecamatan yang tidak cocok data DPT dengan jumlah pemilih yang memberikan hak pilihnya.

"Terkait tidak cocoknya DPT yang di plenokan sebelumnya serta jumlah pemilih disabilitas di Kecamatan Gading Cempaka, itu akan kita tindaklanjuti serta kita berikan penjelasan dalam pleno ini nanti karena mungkin itu ada kekeliruan dalam statistik penginputan data," tambahnya.

Dalam pleno terbuka rekapitulasi suara itu, KPU kota Bengkulu, lanjutnya, bersifat hanya penetapan hasil penghitungan. Dan untuk penetapan pengumuman pemenang itu kewenangan dari KPU Provinsi Bengkulu.

Menurutnya, untuk tidak cocoknya DPT yang di plenokan sebelumnya serta jumlah pemilih disabilitas di Kecamatan Gading Cempaka itu. Pihaknya akan menindaklanjuti serta akan dijelaskan dalam pleno. Menurut Martawansyah, dimungkinkan hal tersebut, karena ada kekeliruan dalam statistik penginputan data. **(war/hue/qia)**

Meningkat, Angka Kematian Tembus...

Sambungan dari halaman 1

Ia mengatakan, penyebab kematian mulai dari sakit, kecelakaan, termasuk terpapar Covid-19. Namun dalam proses pelaporan pihaknya bukan soal penyebabnya, tetapi lebih ke peristiwa kematian.

"Rata-rata penyebab meninggal karena sakit, terlepas dia Covid atau tidak itu menjadi kewajiban Dukcapil selagi dilaporkan akan kita catat," jelasnya.

Sementara itu, Direktur RSHD Kota Bengkulu dr Lista Cerlyviera mengatakan, adanya pandemi Covid-19 yang membuat angka kematian menjadi meningkat. Seperti menjelang kematian penyakit yang sudah ada ditambah terinfeksi virus menjadi lebih mempercepat kematian.

"Orang yang meninggal di rumah belum tentu terbebas dari Covid-19, karena kita tidak tahu. Jika dilakukan Swab semua yang meninggal akan ketahuan karena Covid atau tidak. Itu penyebab angka kematian meningkat tahun ini," ujarnya.

Dia menjelaskan, pada umumnya yang meninggal terpapar Covid-19 sudah memiliki penyakit kronis seperi hipertensi, stroker, jantung dan penyakit bawaan lainnya dengan mereka adanya penyakit itu daya tahan tubuh menjadi rendah akan mudah sekali terinfeksi virus Covid-19. "Orang miliki penyakit kronis ketika terinfeksi virus maka akan menjadi gelaja berat," jelasnya.

Kepada wartawan RB lainnya, Lista Cerlyviera mengakui saat ini untuk kesadaran masyarakat masih rendah, akan bahaya virus ini. Bahkan untuk di Kota Bengkulu hingga saat ini tercatat ada 1.400 orang terjangkit Covid-19. Dan yang dinyatakan meninggal itu ada 63 orang. Dimana rata-rata pasien tersebut datang, telah memiliki gejala berat dengan penyakit kronis, yang sudah di derita sebelumnya. Misalnya diabetes melitus, gagal ginjal, stroke, penyakit jantung.

"Seseorang yang sebelumnya sudah punya penyakit kronis. Itukan daya tahan tubuhnya rendah. Maka mudah tertular virus Covid-19 dari OTG (orang tanpa gejala, red). Dan faktor utama ini penyebab kematian," ucapnya.

Ia menjelaskan dengan terpapar virus ini, akan mengakibatkan perburukan kondisi dari si pasien tersebut. Yang dapat menyebabkan kematian. Untuk itu, diperlukan kesadaran, khususnya saat ini dimana kesadaran masyarakat terhadap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Tidak hanya bagi orang dengan penyakit penyerta, namun juga orang orang disekitarnya pasien itu. Sehingga dapat menekan pasien comorbid terpapar Covid-19.

Mengintai Lansia dan Komorbid

Sejak kemunculannya di Bumi Rafflesia pada akhir Maret lalu, Covid-19 telah memakan 96 jiwa. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Bengkulu, H. Herwan Antoni, SKM, M.Kes, menyebutkan rata rata penyebab meninggalnya pasien Covid-19, dikarenakan faktor usia yang tua, dan memiliki penyakit penyerta (komorbid). Ia pun mengharapkan masyarakat patuh, untuk menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Pasalnya, dengan melihat kondisi rumah sakit rujukan Covid-19 yang penuh. Bahkan pasien pun harus mengantri untuk dirawat di Irna Fatmawati RSMY Bengkulu. Hal ini menandakan kasus kita semakin meningkat.

"Dan kondisi yang terinfeksi itu pada orang orang yang beresiko tinggi. Resiko tinggi untuk dirawat di rumah sakit, dengan kondisi yang sedang dan berat," kata Herwan.

Untuk itu, ia menyarankan bagi masyarakat yang memiliki penyakit penyerta, itu harus taat di rumah. Menghindari berpergian, dan keluarganya pun juga ikut menjaga dengan menjaga jarak dan patuh prokes. Agar orang tua, atau seseorang yang memiliki komorbid tidak terinfeksi olehnya, atau orang lain yang datang ke rumah.

"Termasuk untuk menghindari kegiatan keramaian misalnya ke pesta dalam sementara waktu ini. Itu dihindari dulu ya," imbuhnya.

Untuk diketahui, per 15 Desember tercatat sebanyak 80 tambahan pasien konfirmasi. Bahkan sejak, pertengahan November kalau, untuk jumlah tambahan kasus baru itu, berjumlah puluhan orang. Dan untuk total keseluruhan pasien yang terpapar Covid-19 ada 2.543 orang. Dengan 96 diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Untuk itu, pihaknya juga telah mengoptimalkan fungsi dan kinerja, dari rumah sakit penyanggah untuk membantu menangani lonjakan pasien ini.

"Di rumah sakit penyanggah itu ada rumah sakit Bhayangkara dan DKT itu bisa melayani pasien dengan gejala sedang. Bahkan juga bisa melayani gejala berat, jadi tidak menumpuk di RSMY," tukasnya.

Dikatakannya, orang dengan penyakit penyerta memiliki imun yang lebih rendah daripada orang normal pada umumnya. Inilah yang menyebabkan Covid-19 lebih cepat menyerang dan bersarang pada sistem imun dan pernafasan di dalam tubuh.

Selain itu, lanjutnya, juga faktor usia juga mempengaruhi sistem imun seseorang. Ia pun menyarankan agar untuk para lansia, agar meninggkat kewaspadaan terhadap indikasi terpaparnya virus ini. Dan selalu mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19. **(juu/war)**

175 Kasus Pilkada Antre di Bawaslu

Sambungan dari halaman 1

"Di posisi ketiga, pelanggaran kampanye di luar jadwal 11 kasus," imbuhnya. Terkait money politic, kasus tertinggi terjadi di Lampung Tengah dengan jumlah 32 kasus. Kemudian, diikuti Karawang 6 kasus, Malang 4 kasus, serta 3 kasus di Maros, Konawe Selatan, dan Pangandaran.

Sebagaimana ketentuan, kasus pidana pilkada ditangani secara kolektif oleh sentra penegakkan hukum terpadu (gakkumdu). Saat laporan masuk, Bawaslu akan memutus apakah kasus memenuhi unsur pidana atau tidak.

Jika memenuhi, laporan akan dilanjutkan ke kepolisian. Saat masuk kepolisian, laporan bisa berlanjut ke kejaksaan untuk disidang. Tapi, ada juga pidana pilkada yang berujung penghentian perkara.

Dia mengingatkan, jika terbukti, kasus politik uang memiliki konsekuensi hukum yang berat. Sebagaimana ketentuan pasal 73 ayat 4 UU Pilkada, pelaku diancam pidana 36–72 bulan dan denda Rp 200 juta–Rp 1 miliar.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kemarin menggelar evaluasi pelaksanaan pilkada. Evaluasi dipimpin Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri bersama organisasi masyarakat seperti CSIS, LP3ES, Perludem, Litbang Kompas, Puskapol UI, dan Universitas Telkom.

Kepala BPP Kemendagri Agus Fatoni mengatakan, kegiatan tersebut merupakan instruksi Mendagri terkait perlunya evaluasi penyelenggaraan pilkada. Apalagi, kontestasi itu digelar sejak 2005. Pemerintah memerlukan kajian atas 15 tahun pelaksanaan pilkada guna memetakan kekurangan yang perlu dibenahi.

"Hasil penelitian dari semua lembaga think tank nantinya diramu, dikompilasi, dan dijadikan satu, kemudian akan di-publish setelah dilaporkan kepada menteri dalam negeri," terangnya.

Fatoni belum bisa membeberkan hasil evaluasinya. Namun, dia berharap, hasil evaluasi itu bisa bermanfaat bagi bangsa, terutama terkait penyelenggaraan pilkada. **(far/c13/bay)**

WANDA/RB

SERAHKAN : KPU Kabupaten RL menyerahkan Berita Acara (BA) hasil pleno rekapitulasi perolehan suara Pilkada Bupati dan Wakil Bupati RL kepada Bawaslu dan Saksi Paslon.

Lawan SAHE Tolak Teken Berita Acara

Sambungan dari halaman 1

Paslon Nomor Urut 3 Syamsul-Hendra (SAHE) dalam hasil rekapitulasi tingkat kabupaten tersebut, tetap unggul dari paslon lainnya dengan perolehan 43.540 suara. Disusul paslon nomor urut 4 Fikri-Samuji dengan perolehan 37.556 suara. Selanjutnya paslon nomor urut 1 Faisal-Fatrol dengan perolehan 32.094 suara dan paslon nomor urut 2 Susilawati-Ruswan (SR) dengan perolehan 31.610 suara.

Dengan hasil tersebut, hampir bisa dipastikan paslon SAHE memperpanjang rekor menjadi hattrick secara berturut-turut untuk paslon jalur perseorangan yang mampu memenangi Pilkada di Kabupaten RL. Karena dua kali pilkada sebelumnya di Kabupaten RL juga berhasil dimenangi oleh paslon yang maju melalui jalur perseorangan.

Sama halnya dengan proses rekapitulasi tingkat kecamatan, meskipun saksi dari tiga paslon, masing-masing paslon nomor urut 1, nomor urut 2 dan paslon nomor urut 4 tidak menandatangi berita acara (BA) hasil pleno, namun tetap menerima penyerahan hasil pleno. Bahkan dalam proses rekapitulasi, tidak ada catatan khusus atau keberatan apapun dari masing-masing saksi paslon.

PEROLEHAN SUARA PILBUP REJANG LEBONG

KECAMATAN	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4
Kota Padang	1.141	962	2.850	1.055
PUT	1.796	1.703	3.243	3.936
Sindang Kelingi	1.415	1.256	2.413	2.106
Curup	4.120	3.019	3.473	3.298
Bermani Ulu	1.608	2.143	2.068	2.073
Selupu Rejang	3.409	5.174	4.904	5.576
Curup Utara	1.618	2.745	3.675	2.405
Curup Timur	3.109	3.536	3.474	2.730
Curup Selatan	2.462	2.631	3.802	3.106
Curup Tengah	5.116	3.842	4.032	3.659
Binduriang	1.076	524	1.264	1.825
SBU	1.632	1.065	2.433	1.472
Sindang Dataran	1.147	908	1.565	1.681
SBI	801	663	2.419	915
BUR	1.644	1.439	1.925	1.719
Total	32.094	31.610	43.540	37.556

''Walaupun terdapat ada saksi Paslon yang tidak menandatangani berita acara hasil rekapitulasi tingkat kabupaten ini, tidak jadi persoalan dan tidak mempengaruhi hasil rekapitulasi. Selain itu juga tidak ada catatan khusus maupun keberatan selama pelaksanaan rekapitulasi perhitungan perolehan suara yang kita laksanakan hari ini," sampai Restu.

Ditambahkan Restu, untuk proses dan jadwal penetapan calon bupati dan wakil bupat terpilih dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRBK) terkait sengketa pilkada serentak 2020. ''Jika memang tidak ada gugatan di Pilkada Kabupaten RL, maka paling lambat tiga hari setelah MK mengeluarkan BRPK, kami harus menggelar rapat pleno penetapan calon bupati dan wakil bupati terpilih," demikian Restu.**(dtk)**

Menang, Kopli-Rozi Tidak Bisa Digugat

Sambungan dari halaman 1

Tidak hanya memenangkan Pemilihan Bupati (Pilbup) Lebong, posisi Kopli-Rozi juga dipastikan aman dari gugatan. Itu karena selisih suaranya dengan paslon terdekat, yakni Teguh Raharjo-Nasirwan mencapai 1.380 suara atau 2,08 persen dari 66.208 suara sah. Dalam Lampiran V Peraturan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, selisih suara untuk kabupaten dan kota dengan jumlah penduduk di bawah 250 ribu jiwa paling banyak 2 persen dari total suara sah.

''Kalau soal gugat-menggugat selisih suara, itu haknya setiap paslon. Sepanjang memenuhi syarat sebagaimana diatur MK, silahkan gunakan hak itu. Begitu juga kalau ada paslon yang keberatan dengan hasil rekapitulasi suara yang kami lakukan secara berjenjang, silahkan melapor ke Bawaslu (badan pengawas pemilu, red)," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebong, Shalahuddin Al Khidr, SE.

Sementara Agustam Rachman, SH, MAPS selaku tim kuasa hukum Kopli-Rozi memastikan 3 paslon lainnya tidak bisa menggugat hasil perolehan suara. Berdasarkan pleno rekapitulasi tingkat kabupaten, persentase selisih suara dengan paslon terdekat sudah tidak memenuhi syarat untuk menggugat ke MK. Namun pihaknya siap menempuh upaya hukum jika selisih suara itu tetap dipermasalahkan paslon lain yang bersikeras hendak menggugat.

''Apa yang dihasilkan dalam pleno hari ini (kemarin, red) adalah sebuah produk hukum atas penyelenggaraan Pemilu yang harus ditaati bersama. Baik oleh masing-masing paslon peserta maupun masyarakat. Jika memang tidak menerima hasil pleno, silahkan sampaikan data yang valid ke Bawaslu," tandas Agustam.

Diketahui, hasil pleno KPU Lebong menetapkan perolehan paslon nomor urut 3, Kopli-Rozi 23.655 suara atau 35,7 persen dari total suara sah. Sementara paslon nomor urut 3, Teguh-Nasirwan dengan 22.275 suara atau 33,6 persen. Selanjutnya paslon nomor urut 2, Armansyah-Masropen 15.179 suara atau 22,9 persen serta paslon nomor urut 1, Dalhadi-Wawan 5.099 suara atau 7,5 persen. Atas hasil pleno KPU itu, saksi dari paslon Teguh-Nasirwan menolak dan tidak bersedia menandatangani Berita Acara (BA) rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilbup Lebong.

Alhasil, BA pleno rekapitulasi suara Pilbup oleh KPU Lebong hanya ditandatangani saksi dari Kopli-Rozi. Itu karena saksi dari 2 paslon lainnya tidak menghadiri pleno. Sementara Sekretaris Tim Pemenanganan Teguh-Nasirwan, Eko Prabowono memastikan melaporkan sejumlah kejanggalan penghitungan dan rekapitulasi suara ke Bawaslu Lebong hari ini. Ia mengklaim beberapa kejanggalan itu adanya satu orang yang memilih lebih satu kali.

''Kami sudah menyampaikan adanya kejanggalan proses pemungutan suara di beberapa kecamatan, namun tidak ditanggapi oleh pihak KPU. Alasannya, sesuai dengan Perbawaslu (peraturan badan pengawas pemilu, red) kami diminta untuk melapor ke Bawaslu. Besok (hari ini, red) kami laporkan sejumlah kejanggalan itu ke Bawaslu," tukas Eko. **(sca)**

SHANDY/RB

PARIPURNA: DPRD BU menyerahkan jawaban mereka atas Raperda Jamkesda pada Wabup BU, Arie Septia Adinata dalam rapat paripurna, Selasa (15/12).

Perda Jamkesda Diterapkan Januari

Seluruh Warga Kurang Mampu Dapat BPJS

ARGA MAKMUR – DPRD BU kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda jawaban DPRD atas tanggapan Bupati terkait Raperda Jamkesda yang merupakan raperda Inisiatif dewan. Pemkab BU sendiri sudah menyatakan setuju dan siap mendukung agar raperda tersebut disahkan menjadi perda.

Ketua DPRD BU, Sonti Bakara menjelaskan tujuh fraksi DPRD BU menegaskan raperda tersebut sangat dibutuhkan masyarakat. "Raperda ini juga digagas Komisi I dan sudah sangat siap, termasuk naskah akademiknya," kata Sonti.

Sementara itu, Wabup BU, Arie Septia Adinata, M.AP menjelaskan Pemkab BU akan memasukkan perda dalam lembaran daerah setelah nantinya digelar paripurna pengesahan raperda menjadi perda. Sehingga perda bisa dijalankan terhitung Januari 2021.

"Karena perda ini sangat penting, sebagai dasar hukum pemerintah dalam mengambil kebijakan," terangnya.

Dalam raperda tersebut, seluruh masyarakat yang kurang mampu akan mendapatkan jamkes berupa BPJS Kesehatan. Selain itu, jika dana APBD terbatas, pembiayaan jamkes bisa dilakukan oleh perusahaan sebagai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSLP) melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR).

"Awal tahun kita akan masukkan program pembiayaan jamkes ini dalam list pembangunan perusahaan melalui program TJSLP," kata Arie.

Ia yakin dengan disahkannya raperda tersebut menjadi perda maka akan berdampak positif bagi masyarakat. Terutama yang terkait pelayanan kesehatan dari pemerintah bagi masyarakat yang berstatus kurang mampu.**(qia)**

Satgas Covid Harus Tegas

Kasus Covid-19 Terus Bertambah

ARGA MAKMUR – Penambahan kasus Covid-19 mencapai 150 kasus dalam dua bulan belakangan ini membuat Satgas Covid-19 harus lebih tegas lagi dalam menerapkan sanksi Perbup No 50 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan. Terkait hal itu, Bupati BU, Ir. Mian bersama Kapolres, Dandim dan Kajari mengumpulkan Camat, Danramil dan Kapolsek di taman Setda untuk koordinasi dengan Satgas Covid-19 tingkat kabupaten hingga kecamatan, kemarin.

Mian mengatakan selama ini ia melihat masyarakat masih cuek dengan penerapan protokol kesehatan (prokes). Masyarakat masih menganggap remeh wabah Covid-19 dengan tidak mengikuti saran Satgas untuk melaksanakan prokes. "Kita lihat sejauh ini masyarakat seperti cuek, dan menganggap enteng. Sedangkan saat ini jumlah kasus terus meningkat," kata Mian.

Mian mengajak seluruh Satgas Kecamatan/Desa lebih tegas lagi dalam penerapan Perbup 50 tersebut. Hal ini harus dilakukan untuk menekan angka kasus per hari di wilayah warga BU. "Saya lihat langsung, dalam kegiatan pesta misalnya, tempat cuci tangan hanya sebagai pajangan dan tidak melaksanakan prokes. Sedangkan dalam perbup sudah diatur detail dan tegas. Sehingga kita harus lebih tegas lagi dalam pemberian sanksi," tegas Mian.

Ia juga memerintahkan Satpol PP terus melakukan operasi Yustisi bersama TNI/Polri. Bahkan harus lebih rutin lagi melakukan operasi sehingga masyarakat terus diingatkan hingga diberikan sanksi jika beraktivitas di luar rumah tanpa mematuhi prokes. "Tujuannya kita baik untuk menjaga kesehatan masyarakat," ujarnya.

Tak hanya jumlah kasus positif, juga terdapat 10 kasus meninggal dunia karena Covid-19 yang merupakan warga BU. "Kita jangan terbuai dengan datangnya vaksin. Kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan untuk melakukan pencegahan," katanya.

Ditambahkannya, Pemkab BU tidak mungkin kembali melarang aktivitas berkumpulnya warga seperti pesta pernikahan atau lainnya. Namun ia berharap masyarakat mau patuh pada prokes sehingga meskipun ada aktivitas, tetap bisa melakukan pencegahan Covid-19.

Antisipasi Menyebar di Lapas

Munculnya kasus Covid-19 yang salah satunya pegawai di Lapas Kelas IIB Arga Makmur, Satgas Covid-19 kemarin langsung mengambil langkah antisipasi. Satgas melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh bagian Lapas.

Tak hanya ruang kerja pegawai dan lingkungan Lapas, Satgas juga melakukan melakukan penyemprotan pada tiap ruang sel di Lapas Arga Makmur. Penyemprotan dilakukan Satgas bekerjasama dengan TNI, Polri, Satpol PP dan petugas Lapas.

Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan BU, Ujang Ismail, SKM, M.Ph mengatakan penyemprotan yang dilakukan di Lapas Arma kemarin sebagai bentuk penanganan setelah muncul kasus Covid-19. Selain itu Satgas juga melakukan tracing pada kontak erat pegawai Lapas tersebut.

"Kita menghindari kasus tersebut meluas. Selain itu jika memang ada kasus baru diharapkan bisa segera kita ketahui dan bisa dilakukan penanganan," terangnya.

Di sisi lain, kemarin Satgas juga mengumumkan adanya tambhaan dua kasus baru. Dua kasus baru tersebut yakni dua warga Arga Makmur yang berstatus PNS di BU. Keduanya juga belum diketahui riwayat kontak eratnya hingga menyebabkan tertular Covid-19. "Dua PNS yang kini berstatus positif tersebut melakukan isolasi mandiri karena hanya mengalami gejala ringan dan bisa dilakukan penanganan sendiri dengan pantauan tim medis," jelas Ujang.**(qia)**

IST/RB

PENYEMPROTAN: Satgas Covid-19 saat melakukan penyemprotan disinfektan di kawasan Lapas Arga Makmur, Selasa (15/12).

SHANDY/RB

SUARA TERBANYAK: KPU BU menyerahkan hasil pleno rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Pilbup BU kepada saksi Paslon Bupati-Wabup, Mian-Arie.

Mian: Terima Kasih Masyarakat BU

Pleno KPU Aman

ARGA MAKMUR – KPU Bengkulu Utara (BU) menutup pleno rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Pilkada serentak tingkat KPU BU kemarin (15/12). Sesuai hasil pleno PPK sebelumnya, pada pleno KPU BU tidak ada perubahan suara. Paslon Bupati dan Wabup Mian-Arie Septia Adinata (MARI) tetap meraih suara terbanyak.

Pasangan MARI meraih total 106.078 suara dari 19 Kecamatan. Sedangkan warga yang memilih kolom kosong sebanyak 41.802 suara. Selain itu, ditemukan 8.406 surat suara yang dinyatakan tidak sah. Diantaranya disebabkan surat suara tersebut dicoblos lebih dari satu, dicoblos di luar kolom pasangan calon atau kolom kosong yang disediakan maupun tidak dilakukan pencoblosan sama sekali. Total surat suara yang digunakan sebanyak 156.286 surat suara yang merupakan penjumlahan dari jumlah suara sah dan tidak sah.

Ketua KPU BU Suwarto, SH mengatakan tidak ada keberatan dari saksi terkait hasil tersebut. Sehingga hasil rekapitulasi disahkan KPU dalam pleno kemarin sebagai hasil perolehan suara Pilbup di BU. "Perolehan suara sudah kita sahkan. Sebelumnya sudah kita tanyakan pada saksi, apakah ada keberatan atau tidak. Saksi pasangan calon menyatakan tidak ada keberatan," terangnya.

Pantauan RB, dalam pleno kemarin sama sekali tidak ada sanggahan terkait hasil penjumlahan perolehan suara tingkat kecamatan, sehingga tidak ada perdebatan.

Terkait hasil pleno tersebut, Ir. Mian sebagai Cabup peraih suara terbanyak menyatakan ucapan terima kasih pada masyarakat BU terutama yang sudah datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya. Mian menegaskan ia dan Arie akan memimpin BU dengan adil tanpa membeda-bedakan pendukung dan bukan pendukung.

"Pendukung itu hanya ada saat Pilkada, dan Pilkada sudah usai. Nantinya kami akan dilantik sebagai Bupati dan Wabup BU, bukan untuk sekalompok orang. Kami mengucapkan terimakasih pada masyarakat," pungkas Mian.**(qia)**

KEMERIAHAN HUT KE-21 DWP BENGKULU UTARA

Dharma Wanita Persatuan (DWP) Bengkulu Utara (BU) kemarin menggelar peringatan HUT ke-21 DWP. Tahun ini DWP BU mengambil tema Peran Dharma Wanita Persatuan Dalam Pemberdayaan Perempuan di Era Digital Untuk Mendukung Terwujudnya Ketahanan Keluarga Indonesia. Dalam peringatan HUT DWP BU menggelar berbagai acara untuk memeriahkan HUT. (qia)

PIDATO: Sekda Dr. Haryadi, MM, M.Si dan Ketua DWP Ny. Junita Haryadi saat menyampaikan pidatonya dalam acara HUT ke-21 DWP, Selasa (15/12).

TUMPENG : Sekda BU, Dr. Haryadi dan Ketua DPRD BU, Sonti Bakara, SH saat melakukan pemotongan tumpeng.

HADIAH: Ny Meita Arie saat memberikan hadiah pada pemenang perlombaan HUT DWP. Dilanjutkan dengan foto bersama.

Pejabat Harus Dukung DWP

ARGA MAKMUR – Dalam HUT Dharma Wanita Persatuan (DWP) ke-21 kemarin, Sekda BU Dr. Haryadi, MM, M.Si menilai kegiatan yang dilakukan DWP selama 21 tahun di BU ini sangat positif. Ia meminta para pejabat yang istrinya tergabung di DWP harus mendukung istrinya dalam melaksanakan kegiatan organisasi tersebut.

Haryadi menegaskan jika ada pejabat yang tidak mendukung istrinya dalam berorganisasi di DWP, maka bisa saja dicopot. DWP adalah organisasi istri PNS baik itu pejabat maupun PNS non jabatan untuk menjalankan program-program bagi masyarakat.

"Jadi saya minta seluruh PNS, apalagi pejabat untuk mendukung istri dan program DWP. Jika memang tidak mendukung, bisa saja dinonjobkan," tegas Sekda sedikit bercanda.

Haryadi mengatakan sudah banyak yang dilakukan DWP. Apalagi dalam bidang pendidikan anak, perempuan dan keluarga. Hal ini sangat penting untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) di BU. "Ada peran-peran pemerintah yang memang akan jauh lebih baik dilaksanakan oleh organisasi perempuan. Selama ini program yang dilakukan sudah berjalan dan sangat berhasil," tegasnya.

Sementara Ketua DWP BU, Ny Junita Haryadi berterima kasih kepada Bupati Mian dan Wabup Arie Septia Adinata. M.AP. Ia merasa selama ini DWP sudah mendapatkan banyak dukungan dari pemerintah dalam melaksanakan semua agenda kegiatan.

"Kami yakin di periode kedua nantinya Pemkab akan terus mendukung semua program DWP yang bertujuan untuk peningkatan SDM dan keluarga di BU," pungkas Junita.**(qia)**

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI BENGKULU

Jalan Jend. Sudirman No. 37 Telp./Fax. (0737) 521028 e-mail:Kab-bengkuluutara@bpn.go.id

PENGUMUMAN
(Tentang Sertipikat Hilang)
Nomor: 32/Peng-19.17/XII-2020

Untuk mendapatkan Sertipikat baru sebagai pengganti Sertipikat yang hilang, berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa:

No.	Nama/ Alamat Pemohon	Hak Atas Tanah Jenis dan Nomor Hak	NIB	Terdaftar Atas Nama	Tanggal Permohonan	Letak Tanah a. Jalan b. Desa/ Kel c. Kec	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sri Fatmah Desa Air Putih Kec. Putri Hijau	HM-01028 (Sebelumnya HM. 00445)	00368	SYAMAN	-	a. - b. Air Putih (Sebelumnya Desa Kesahan Sebbal Wpu) c. Putri Hijau (Sebelumnya Kecamatan Kesahan)	- STPLK Polres Bengkulu Utara Nomor Pol: LP/1371/X/2020/SPKT/RES BKL UTARA Tanggal 24 Agustus 2020. - Surat Pernyataan Dikenali Kampali Tanggal 14-12-2020

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini, bagi mereka yang merasa berkeberatan dapat mengajukan keberatan-keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat.

Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan penggantian sertipikat tersebut di atas, maka sertipikat pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum dan sertipikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.

Arganamakmur, 14-12- 2020

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA

ALBERT TAMSI, SH.MH
NIP. 196212171991031013

RIO/RB

PARIPURNA: Ketua DPRD BS, Barli Halim bersama Bupati BS, Gusnan Mulyadi usai penandatanganan KUA-PPAS, Selasa (15/12).

Sebelum Akhir Desember Program Harus Tuntas

KOTA MANNA – DPRD BS bersama eksekutif menandatangani nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dalam rapat paripuran kemarin (15/12). Sebelum akhir Desember ini, bupati dan jajaran harus menuntaskan rencana program yang akan dijalankan pada 2021.

Sebelumnya paripurna penandatanganan kesepakatan KUA- PPAS tertunda cukup lama. Ada penurunan dana yang akan dialokasikan untuk APBD tahun 2021 sebesar Rp 119 miliar. Sehingga APBD BS pada tahun 2021 diperkirakan berada di angka Rp 900 miliar. Program yang akan dijalankan pada tahun depan harus diutamakan skala prioritas.

Akhir Desember mendatang, seluruh program yang akan dijalankan harus diserahkan ke DPRD BS untuk menjadi acuan kerja eksekutif dan legislatif BS.

Ketua DPRD BS Barli Halim, SE mengatakan, saat ini yang paling diutamakan untuk kegiatan melalui APBD tetap difokuskan pada penanganan Covid-19. Sehingga beberapa kegiatan lainnya yang diluar penanganan Covid -19, DPRD berharap harus memiliki dampak pembangunan karena dengan APBD hanya Rp 900 miliar tentu banyak menimbulkan kendala.

"Tentunya prioritas masih fokus pada penanganan Covid, namun diluar itu tetap ada pembangunan," terang Barli.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD BS, Nissan Deni Purnama berharap agar pemerintah bisa mencari dana tambahan berupa CSR dan pajak retribusi yang harus dimaksimalkan. "Tentunya Pemkab BS harus memikirkan tambahan, supaya pembangunan BS tetap berjalan sehingga tidak hanya terpaku dengan dana APBD," ujar Deni.**(tek)**

Kades Air Umban Bakal Dinonaktifkan

Kasus Dugaan Korupsi DD

KOTA MANNA - Perkara dugaan korupsi Dana Desa (DD) Air Umban, Kecamatan Pino terus bergulir. Terbaru Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bengkulu Selatan (BS) sudah mempersiapkan Sekretaris Desa untuk dijadikan Pjs Kades. Hal itu apabila nanti Kejaksaan Negeri (Kejari) BS melakukan penetapan tersangka terhadap kades.

DPMD mendukung penuh adanya penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. Sebab sejak jauh-jauh hari Dinas PMD BS sudah memperingatkan seluruh kades di 142 desa dan 16 kelurahan untuk tidak melakukan tindakan yang diluar kewenangan. Pengusutan kasus dugaan korupsi DD berupa pemotongan honor perangkat Desa Air Umban sejak tahun 2015 ini, disikapi serius Dinas PMD BS.

Kepala Dinas PMD BS, Hamdan Syarbaini, S.Sos memastikan segera menonaktifkan Kades Air Umban, Suit Iman, apabila nanti memang terbukti melakukan tindak pidana korupsi itu.

Jika penetapan tersangka nanti sudah dilakukan Kejari BS, jabatan Pjs Kades akan diemban Sekretaris Desa hingga proses persidangan selesai dilakukan. "Dinas PMD mendukung semua kegiatan desa, dan mengingatkan para kades agar tidak main-main dengan pelaksanaan DD. Untuk Air Umban kalau memang terbukti, Dinas PMD akan menonaktifkan dan mengganti jabatan Kades yang akan diisi oleh Sekdes sebagai Pjs Kades," terang Hamdan.

Untuk diketahui saat ini Kejari BS masih menyelidiki aliran DD Air Umban yang diduga disalahgunakan oleh kades. Sementara Kades Air Umban, Suit Iman saat mau dikonfirmasi mengenai kasus yang menimpanya belum bisa dihubungi.**(tek)**

IST/RB

AMANKAN : Warga Desa Kayu Ajaran, Kecamatan Ulu Manna mengamankan salah seorang yang diduga mencuri barang-barang warga di pondok kebun.

Amankan Pencuri di Pondok Kebun

KOTA MANNA– Sering terjadinya kehilangan barang-barang di pondok kebun di Desa Kayu Ajaran, Kecamatan Ulu Manna, membuat warga selaku pemilik pondok resah. Namun setelah warga melakukan pengintaian, akhirnya pelaku berhasil ditangkap. Pelaku merupakan seorang wanita berinisial Is, dan mengaku dari Medan, Sumatera Utara.

Data terhimpun, warga pemilik pondok yang kehilangan barang-barangnya beragam. Mulai dari alat untuk bekerja hingga makanan di kebun. Hal inilah yang membuat warga semakin marah. Sebab selama ini lokasi kebun warga terbilang aman dan tidak ada yang kehilangan barang-barang. Namun dalam dua minggu terakhir warga resah akibat ulah pelaku.

Sekretaris Desa Kayu Ajaran, Bambang mengatakan, warganya sudah sangat kesal dengan ulah pelaku yang selama ini mengambil barang-barang petani di kebun. Tuduhan ini disebutkan Bambang bukan tanpa alasan, sebab setelah dilakukan pengintaian pelaku berhasil tertangkap tangan. Bahkan setelah diinterogasi warga, pelaku mengakui perbuatannya.

Agar permasalahan ini diselesaikan secara hukum, pihak Desa Kayu Ajaran menyerahkan yang bersangkutan ke Polsek Pino. Kapolres BS AKBP. Deddy Nata,S. IK melalui Kapolsek Pino Iptu. Saryono mengakui pihaknya usai menerima laporan warga yang mengamankan pelaku yang diduga mengambil barang-barang warga di pondok kebun. "Pelaku sudah diamankan di Polsek," ujarnya.**(tek)**

RIO/RB

DISITA: Sebanyak 115 liter tuak berhasil diamankan dari Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna oleh Sat Sabhara Polres BS.

115 Liter Tuak Dimusnahkan

KOTA MANNA - Sat Sabhara Polres BS menggelar Operasi Cipta Kondisi yang menyasar lokasi keramaian, warung remang-remang (warem) dan warung tuak. Hasilnya polisi berhasil menyita sebanyak 115 liter tuak dan langsung dimusnahkan, kemarin (15/12).

Operasi ini untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kapolres BS, AKBP Deddy Nata, S.IK melalui Kasat Sabhara, AKP Syafik mengatakan, tuak disita dari lokasi yang berbeda. Pertama pihaknya mendatangi warung Maju Gultom (48) di Sebiris Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna. Di lokasi itu polisi menemukan 85 liter tuak dalam ember dan jerigen.

Selanjutnya, polisi bergerak ke lokasi kedua di warung atau rumah Sialagan (52) di Jalan SDIT Manna. Polisi melakukan penggeledahan dan menemukan 30 liter tuak yang disimpan dalam ember. "Langsung kami sita dan musnahkan. Peringatan terus dilakukan tapi tetap saja masih ada yang nekat jual tuak," kata Syafik.

Untuk pemilik tuak, mereka diberi peringatan agar tidak lagi menjual tuak. Bahkan apabila kedapatan mengulangi perbuatan yang sama akan dikenakan sanksi oleh aparat.

Syafik menyampaikan, larangan penjualan tuak dikarenakan konsumsi minuman tersebut banyak memberi mudarat. Seperti memicu keributan dan perkelahian hingga dapat menimbulkan tindakan kriminal. "Kebanyak keributan terjadi usai menenggak tuak, jadi banyaklah memberikan dampak negatif," tegasnya.**(tek)**

MCSELUMA/RB

RAIH: Penghargaan yang diterima Ketua TP-PKK Kabupaten Seluma diwakili Waka 4 TP PKK Seluma.

Ketua TP-PKK Raih Manggala Karya Kencana

SELUMA - Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Seluma Hj. Elda Efita Bundra mendapat penghargaan. Berupa Piagam Penghargaan Manggala Karya Kencana (MKK) Tahun 2020 dari Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Bengkulu pada Senin (14/12) lalu.

Penghargaan ini didapatkan atas prestasi yan menonjol dalam menggerakkan berbagai macam program PKK. "Benar, Ketua TP-PKK Seluma meraih penghargaan Manggala Karya Kencana (MKK) Tahun 2020," sampai Sekretaris TP-PKK Kabupaten Seluma Dewi Ilmiawanti MAP.

Ia juga menyampaikan bahwa penghargaan ini diperoleh atas prestasi yang menonjol dan komitmen. Serta kepemimpinannya dalam menggerakkan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana untuk terwujudnya keluarga berkualitas dan penduduk tumbuh kembang.

"Penghargaan ini diraih atas prestasinya dalam program PKK yang sukses," ucap Dewi.

Penghargaan ini sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor 137/KEP/G2/2020 Tanggal 26 Juni 2020.**(cup/rls)**

YUDI/RB

SALURKAN: Bantuan alat disabilitas yang disalurkan tim Dinsos Seluma kepada penerimanya, kemarin.

2021, Bantuan Disabilitas Dianggarkan Kembali

SELUMA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma melalui Dinas Sosial (Dinsos) telah menyalurkan bantuan kepada para penyandang disabilitas berat. Penyaluran itu sendiri dilakukan sejak Senin (14/12) lalu. Yakni dengan langsung mendatangi rumah masing-masing penerima agar tidak mengumpulkan banyak massa.

Setidaknya ada lebih dari 40 unit bantuan yang disalurkan kepada penerimanya. Bantuan itu berupa alat bantu kepada para penyandang disabilitas. "Sudah mulai kita salurkan, penyalurannya langsung mendatangi rumah penerima," jelas Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Seluma, Herman, S.Sos melalui Kabid Perlindungan Jamsos dan Habilitasi, Aziman SE.

Ia menambahkan, alat bantunya sendiri berupa alat bantu dengar, alat bantu jalan dan alat bantu lainnya. Untuk jumlahnya berupa 11 unit kursi roda, 3 unit alat bantu dengar, sepasang tongkat sangga dan lainnya. Penyaluran bantuan itu sendiri akan langsung diantarkan ke penerimanya. Mengingat jika bantuan itu disalurkan secara mengumpulkan massa tentunya akan menyulitkan para penerima.

Maka dari itu, pihaknya menurunkan tim untuk menyalurkan bantuan itu langsung ke rumah masing-masing penerima. "Bantuannya ini langsung disalurkan ke rumah masing-masing penerima, penyalurannya sesuai dengan pengajuan mereka," lanjutnya.

Sementara itu, pada tahun 2021 nanti kembali akan ada bantuan serupa. Mengingat Dinsos Seluma kembali menganggarkan untuk pengadaan bantuan tersebut. Adapun anggarannya sendiri juga sama seperti tahun 2020 ini yaitu sekitar Rp 60 juta. Hal ini mengingat bantuan disabilitas merupakan program rutin yang memang selalu diberikan setiap tahunnya kepada penerima.

"Untuk tahun depan nanti bantuan ini akan ada lagi, karena anggarannya kembali dimasukkan, ini memang program rutin," pungkasnya. **(cup)**

YUDI/RB

PLENO: Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilbup Seluma yang digelar KPU tadi malam. Hasilnya, perolehan suara Erwin-Yayan unggul dari paslon lainnya.

Erwin-Yayan Menuju BD 1 P

Hasil Pleno KPU Kabupaten Seluma

SELUMA - KPU Kabupaten Seluma menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Seluma tahun 2020 pada Selasa (15/12) yang berjalan hingga pukul 22.30 WIB tadi malam.

Pelaksanaan rapat pleno terbuka ini digelar di Gedung Daerah Kabupaten Seluma dan dipimpin langsung oleh Ketua KPU Seluma. Adapun hasil perhitungan suara dalam pleno ini tidak berbeda dengan hasil pleno di tingkat kecamatan (PPK) yang telah digelar sebelumnya. Meskipun demikian, terjadi peningkatan partisipasi pemilih yang cukup signifikan pada Pilkada tahun ini. Yang mana partisipasi pemilih pada Pilkada Seluma 2020 ini mencapai angka 87,3 persen.

Berdasarkan hasil rekapitulasi suara dalam Pleno ini, paslon nomor urut 3 Erwin Oktavian SE - Drs Gustianto unggul jauh dengan perolehan suara sebanyak 55.638 atau jika dipersentasikan sebanyak 48 persen. Sementara pasangan Paslon nomor urut 2 Edison Simbolon S.Sos - Khairi Yulian S.Sos meraih suara sebanyak 41.122 atau sebanyak 35 persen, sedangkan Paslon nomor urut 1 Drs Suparto M.SI - Noviawan Ail SE hanya meraih suara sebanyak 19.205 atau sebanyak 17 persen saja.

Untuk total suara sah berjumlah 115.965 suara yang tersebar di 450 TPS yang ada. Sedangkan untuk total suara tidak sahnya mencapai 5311 suara. Dengan begitu, untuk total partisipasi pemilih sendiri sebanyak 121.276 atau sebanyak 87,3 persen. Mengingat jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Seluma pada tahun ini sebanyak 137.919.

Ketua KPU Seluma, Sarjan Effendi SE mengatakan bahwa dalam pelaksanaan Pilkada 2020 ini animo masyarakat akan memilih memiliki peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatannya pun sangat tinggi dan bahkan melebihi target nasional. Tentunya hal ini merupakan hasil kerja keras semua pihak mulai dari penyelenggara Pilkada, pengawas Pilkada, instansi terkait, media massa baik koran cetak hingga tv dan tentunya masyarakat.

"Alhamdulillah, partisipasi pemilu meningkat, 87,3 persen, ini hasil yang sangat bagus," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa dalam rapat pleno kabupaten ini seluruh PPK dihadirkan dan menyampaikan rekapitulasi yang telah dilakukan pada tingkat kecamatan. PPK diminta untuk membuka lembar hasil penghitungan suara di kecamatan untuk disaksikan oleh KPU, Bawaslu, dan perwakilan saksi kandidat. Setelah itu, dilanjutkan dengan penandatangan berita acara. Kegiatan ini berjalan sukses tanpa adanya kendala. Setelah seluruh tahapan pleno selesai dilakukan, KPU akan langsung mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati – Wakil Bupati Seluma terpilih. Namun, hal tersebut baru akan dilakukan jika dari Mahkamah Konstitusi mengeluarkan tidak adanya gugatan yang masuk.

"Kita menunggu dahulu, jika tidak adanya gugatan yang masuk ke MK, maka akan langsung dilakukan penetapan," pungkasnya. **(cup)**

PLENO KPU PERHITUNGAN PILKADA SELUMA

No	Kecamatan	Paslon Urut 1	Paslon Urut 2	Paslon Urut 3
1	Seluma	1017	1790	2913
2	Seluma Barat	1234	2048	2229
3	Seluma Timur	1198	2533	2358
4	Seluma Selatan	2609	2556	2515
5	Seluma Utara	640	3305	1345
6	Sukaraja	3618	6169	8928
7	Air Periukan	1372	4792	6625
8	Lubuk Sandi	1313	2431	2837
9	Talo	919	1655	4309
10	Ilir Talo	1055	2441	5611
11	Ulu Talo	884	1210	1309
12	Talo Kecil	345	1922	3603
13	Semidang Alas	1174	2975	4276
14	Semidang Alas Maras	1827	5295	6780
Jumlah		19205	41122	55638
Persentase		17 %	35 %	48 %

Suara Sah : 115.965
Suara Tidak Sah : 5.311
Total : 121.276
Jumlah DPT Seluma : 137.919
Partisipasi Pemilih : 87,3 Persen

YUDI/RB

PERSIAPAN : Polres Seluma saat melakukan apel rutin serta membahas kesiapan pengamanan menjelang Nataru, kemarin.

Jelang Nataru, Giatkan Patroli Gabungan

SELUMA - Tingginya mobilitas masyarakat saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) tentunya selalu menjadi perhatian khusus dari Polri setiap tahunnya. Kali ini, ditengah pandemi ini tentunya Polri harus lebih ekstra dalam melakukan pengamanan dan penertiban. Maka dari itu, Polres Seluma akan membentuk pos pam dibeberapa titik lokasi. Juga melakukan patroli untuk mencegah adanya aktivitas keramaian masyarakat yang tidak mengikuti protokol kesehatan.

Kapolres Seluma, AKBP Swittanto Prasetyo, SIK mengatakan dalam pengamanan Nataru nanti pihaknya akan menggelar apel pasukan dan penempatan pos pam. Pos pam tersebut nantinya akan didirikan di sejumlah titik lokasi seperti pada Idul Fitri lalu. Adapun giat tersebut akan mulai dilaksanakan pada tanggal 21 Desember hingga 4 Januari nanti.

Ini dilakukan dalam rangka mengamankan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Juga dengan operasi ini diharapkan angka kriminalitas bisa ditekan. Mengingat saat Nataru nanti biasanya terjadi peningkatan baik aktifitas masyarakat maupun lalu lintas.

"Benar bang, nanti ada gelar pasukan dan pos pam, mulai tanggal 21 Desember nanti pelaksanaannya," sampai Kapolres.

Kapolres menambahkan, dikarenakan saat ini masih pandemi Covid-19 maka pihaknya akan mencegah adanya kerumunan massa yang berlebihan. Pihaknya akan mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerumunan khususnya tempat-tempat wisata. Ini dilakukan dengan melaksanakan patroli gabungan bersama instansi terkait yaitu Satpol PP Kabupaten Seluma. Patroli itu sendiri menekankan penerapan disiplin protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak dan lainnya. Apabila nantinya ditemukan adanya kegiatan kerumunan massa yang tidak menerapkan protokol kesehatan maka akan dibubarkan.

"Ini juga menjadi fokus kita, karena saat ini masih pandemi Covid-19 maka untuk kerumunan massa yang berlebihan masih tidak diperbolehkan," pungkasnya. **(cup)**

Waktu Pengerjaan Proyek Taman Kota Diperpanjang

SELUMA - Pasca bencana badai yang menerpa Kabupaten Seluma beberapa waktu lalu membuat atap panggung utama Taman Kota terbang. Oleh karena itu, pekerjaan taman yang ada di Kelurahan Talang Saling itu terpaksa tidak selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Yang pasti, kontraktor yakni CV akan kembali memperbaiki atap seperti semula. Namun karena murni disebabkan faktor bencana, proyek yang didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp 2 miliar ini akan diperpanjang masa pekerjaannya. Padahal progress pembangunan taman kota itu sebelumnya sudah mencapai sekitar 90 persen.

Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Seluma, Rijono SPd MSi melalui Kabid Pariwisata, Airin mengatakan bahwa rencana target penyelesaian proyek yang didanai dari DAK ini semula ditargetkan akan tuntas pada 19 Desember mendatang. Namun dikarenakan faktor bencana alam yang membuat kerusakan, maka waktu pengerjaannya harus diperpanjang lagi.

Hal ini untuk memberikan waktu tambahan kepada pihak pelaksana proyek untuk memperbaiki atap panggung utama taman yang telah rusak diterpa badai beberapa waktu lalu. "Karena faktor bencana alam maka tentu diberikan waktu tambahan, kalau sebenarnya itu sudah harus selesai pada 19 Desember ini," sampainya.

Pihaknya juga berharap pekerjaan tersebut bisa selesai tepat waktu sesuai dengan kontrak awal. Tujuannya adalah agar persiapan dalam membuka taman itu lebih cepat dilaksanakan. Mengingat memang pada awal tahun 2021 nanti, Taman Kota itu ditargetkan sudah berfungsi sesuai peruntukannya. Yakni sebagai taman wisata dan juga lokasi penjualan cinderamata khas Kabupaten Seluma.

"Kita harap bisa selesai cepat, sehingga awal 2021 nanti itu sudah bisa digunakan," lanjutnya.

Sementara itu, Kontraktor Pelaksana, Oyon mengaku akan memperbaiki kembali atap panggung utama yang telah rusak tersebur. Perbaikan itu akan dilakukan dengan merubah dudukan rangka baja pada gambar. Ini untuk memperkokoh atap saat diterpa bencana angin kencang seperti yang terjadi sebelumnya. Dirinya juga memastikan pekerjaan tersebut akan selesai pada sebelum perhantian tahun nanti.

"Tentu akan kita perbaiki, akan kita rubah supaya tahan oleh bencana alam seperti badai," pungkasnya. **(cup)**

INFO HOTEL

HOTEL	ALAMAT	TELPON / FAX/ HP
LATANSA / SYARIAH	Jl. Tribrata No. 42 Kel. Cempaka Permai (Simpang 4 Polda)	(0736) 52549 / 0812 7103 8847
THE MADELINE	JL. Bakti Husada No. 88 Kel Lingkar Barat	(0736) 52777 / 08117861940
SANTIKA	JL. Raya jati No 45 Kel. Sawah Lebar Kec Ratu Agung, Bengkulu	(0736) 25858

ALBERTUS/RB

PARIPURNA: Sekda Kaur, Nandar Munadi saat menyampaikan jawaban pemerintah terhadap pandangan fraksi di DPRD Kaur.

RAPBD 2021 Dikebut

KOTA BINTUHAN – RAPBD Kaur tahun 2021 akan dikebut pembahasannya oleh Banggar DPRD dan TAPD Pemkab Kaur. Dalam rapat paripurna kemarin (15/12), empat fraksi di DPRD Kaur menyetujui RAPBD 2021 dan 7 raperda lainnya dilanjutkan pembahasannya.

Dengan waktu kurang lebih 15 hari, Banggar dan TAPD harus sudah menuntaskan pembahasan anggaran tahun 2021. Anggota Banggar DPRD Kaur, Denny Setiawan mengatakan dengan waktu yang ada dan terlepas dari semua kegiatan politik, pihaknya memastikan akan serius membahas RAPBD 2021. Karena banyak kegiatan yang harus tetap dilakukan untuk pembangunan Kaur tahun 2021. Termasuk anggaran penanganan Covid-19.

"Untuk pembahasan RAPBD 2021 akan segera kita kebut karena waktu terbatas. Anggarannya harus tepat untuk pembangunan Kaur ke depan. Apalagi masa Covid-19 saat ini, kita harapkan awal tahun 2021 semua kegiatan OPD tetap berjalan baik," ungkap Denny.

Sebelumnya DPRD Kaur menggelar paripurna jawaban jawaban pemerintah daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kaur terhadap rancangan peraturan daerah tentang pendapatan dan belanja daerah tahun 2021. Dan, delapan raperda Kabupaten Kaur tahun 2020 di gedung DPRD Kaur. Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kaur, Diana Tulaini hanya dihadiri Sekda Kaur Nandar Munadi, S.Sos, M.Si.

Nandar Munadi memastikan Pemkab Kaur tahun 2021 tetap mengutamakan sosialisasi agar warga Kaur tetap waspada Covid-19. Serta mematuhi protokol kesehatan terutama di tempat-tempat keramaian. "Pemerintah dalam penyusun anggaran tahun 2021 telah berpedoman pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah melalui SIPD. Dengan demikian pengelolaan keuangan daerah akan lebih transparan," papar Nandar Munadi saat membacakan jawaban pemerintah terhadap pandangan fraksi kemarin.(**cik**)

Tunggu Pemeriksaan 208 Sampel Swab

IST/RB

SWAB: Petugas Dinkes Kaur saat mengambil sampel swab. Saat ini sudah 208 warga diambil sampel swab dan masih menunggu hasil pemeriksaannya.

Kasus Covid-19 Potensi Bertambah

KOTA BINTUHAN - Mulai kendornya masyarakat Kaur terhadap protokol kesehatan Covid-19, berdampak dengan meningkatnya warga yang mempunyai gejala seperti terpapar Covid-19. Bahkan dalam bulan ini jumlahnya terus meningkat. Hal ini terlihat dari jumlah pengambilan sampel swab yang dilakukan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaur.

Dalam satu bulan ini saja sudah 208 orang yang diambil sampel swab oleh petugas Dinkes. Sampel swab tersebut sudah dikirim laboratoriun di Kota Bengkulu dan tinggal menunggu hasilnya, positif Covid-19 atau tidak.

Kepala Dinkes Kaur, Azwar melalui Kabid P2P Juli Haryanto mengakui jumlah warga yang reaktif dan sudah diambil sampel swab terus meningkat. Untuk itu ia mengimbau warga selalu mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker saat keluar rumah, sering mencuci tangan dan jaga jarak di tempat umum atau keramaian.

" 208 orang sudah kita ambil sampel swab karena mempunyai gejala seperti Covid-19. Jumlah ini mengalmi peningkatan dibanding sebelumnya, untuk itu kita imbau warga Kaur untuk selalu waspada," imbau Juli.

Sementara itu, saat ini jumlah warga Kaur yang sudah terpapar atau positif Covid-19 sebanyak 51 orang. Dari jumlah tersebut sampai kemarin (15/12) masih ada enam warga lagi yang masih menjalani isolasi mandiri. Selebihnya sudah dinyatakan sehat atau sembuh.

"Untuk sampel swab yang sudah kita ambil saat ini sudah kita kirim ke Bengkulu untuk mengetahui hasilnya. Sampai saat ini masih ada enam orang lagi warga Kaur yang menjalani isolasi mandiri karena positif Covid-19," beber Juli.

Pantauan RB, masih banyak warga Kaur yang berkumpul di tempat perbelanjaan dan tempat-tempat makan setiap harinya. Mereka ada yang tidak memakai masker dan mematuhi protokol kesehatan. Hal ini diduga kuat menjadi penyebab meningkatnya kasus Covid-19 di Kabupaten Kaur. Apalagi pasca pilkada jumlah warga yang mempunyai gejala seperti Covid-19 terus bertambah. (**cik**)

NIP 102 CPNS Sudah Keluar

KOTA BINTUHAN – NIP 102 CPNS Kabupaten Kaur yang lulus Oktober 2020, sudah keluar. Saat ini BKD dan PSDM Kaur masih menyusun jadwal pembagian SK bagi para CPNS tersebut. Diperkirakan akan dilaksanakan dalam bulan Desember ini.

Kabid Mutasi BKD dan PSDM Kaur, Yosi Afriyanti mengakui NIP CPNS baru telah keluar dan siap untuk dibagikan kepada 102 CPNS. Namun untuk sementara pihaknya masih menyusun jadwal dan SK CPNS. Setelah selesai semua baru akan dibagikan dalam waktu dekat.

Sebanyak 102 CPNS ini dipastikan akan mulai aktif bekerja pada Januari 2021 jika akhir Desember 2020 ini NIP dibagikan. "NIP sudah kita terima dan akan kita bagikan. Jadwalnya sedang kita susun. Jika sudah siap akan kita bagikan dan mereka juga akan langsung bertugas," kata Yosi.

Tidak hanya 102 CPNS yang baru lulus saja, namun 233 CPNS yang akan diangkat menjadi PNS pada tahun ini, juga menunggu informasi pengangkatan mereka. Karena sudah hampir dua tahun mereka menjalankan tugas sebagai CPNS, namun belum diangkat menjadi PNS penuh. Salah satu penghambat mereka diangkat jadi PNS yakni adanya pandemi Covid-19, sehingga kegiatan prajabatan yang sudah mereka jalankan tertunda.

Terkait 233 CPNS yang belum diangkat menjadi PNS, BKD dan PSDM Kaur menyebutkan SK mereka telah dibuat dan dalam waktu dekat akan dibagikan. Sehingga tahun 2021 sebanyak 233 CPNS tersebut sudah resmi menjadi PNS. "Proses SK sudah hampir rampung, mungkin kalau tidak ada halangan minggu depan kita bagikan," terang Kabid Pengembangan Aparatur Penilaian Kinerja dan Penghargaan BKD dan PSDM Kaur, Slamet Dwi Cahyo.(**cik**)

PEMBUKAAN: Komisioner KPU Kaur saat membuka kegiatan pleno dan pelaksanaan pleno tingkat Kabupaten Kaur.

PLENO KPU KABUPATEN KAUR
BERJALAN AMAN

KPU Kabupaten Kaur pada tanggal 15 Desember 2020 telah melaksanakan pembukaan pleno untuk penghitungan suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur. Kegiatan ini dihadiri dan dibuka langsung Ketua KPU Kaur, Meixxsy Rismanto dan Komisioner KPU Kaur lainnya. Dengan para tamu undangan dari Kejari Kaur, Polres Kaur dan Pabung 0408 BS-Kaur serta anggota Bawaslu Kaur. Kegiatan berjalan aman dan lancar dengan pengawalan ketat anggota Polres Kaur.**(cik)**

TAMU: Sejumlah tamu undangan yang menghadiri pleno terbuka KPU Kaur.

PLENO : Para peserta pleno satu persatu menerangkan hasil rekap per kecamatan.

KOTAK: Peserta pleno saat membuka kotak suara untuk dibacakan hasilnya oleh setiap PPK secara bergantian.

Lintas

Gelapkan Motor Teman Kerja

BENGKULU- Tim opsnal Polsek Kampung Melayu mengamankan satu orang tersangka penggelapan sepeda motor. Pria itu berinisial AS (35) warga Kelurahan Bumi Ayu. Dia diringkus Minggu (13/12) malam lalu di rumahnya.

Tersangka dilaporkan telang menggelapkan sepeda motor Honda Supra X 125 milik Yoyo warga Kelurahan Teluk Sepang, rekan satu kerjanya, awal November lalu. Tersangka meminjam motor Yoyo untuk membeli rokok, namun sampai pelaku diamankan, sepeda motor tidak dikembalikan kepada korban.

Hal tersebut dibenarkan oleh Kapolres Bengkulu AKBP. Pahala Simanjuntak, S. IK melalui Kapolsek Kampung Melayu, Iptu. Surya R Purnama, SH, MH.

"Modusnya pinjam motor untuk beli rokok tapi tidak dikembalikan sampai 9 bulan, " ungkap Kapolsek.

Penggelapan tersebut bermula saat pelaku dan korban sama-sama melamar bekerja di toko bangunan yang ada di sekitaran Kelurahan Kandang. Keduanya sama-sama diterima kerja di toko bangunan tersebut. Setelah 3 hari bekerja tersangka meminjam sepeda motor untuk membeli rokok.

Korban yang tidak curiga meminjamkan motornya. Tetapi sudah lebih dari satu minggu tidak jelas keberadaan dimana tersangka membawa sepeda motor korban.

Dari pengakuan tersangka, motor tersebut digunakan untuk kesehariannya beraktifitas. Belum ada niat untuk mengembalikan karena tersangka tidak memiliki sepeda motor.

"Digunakan untuk sehari-hari, belum ada niat untuk mengembalikan," imbuhnya.

Pelaku tidak hanya sekali melakukan tindak pidana. Sebelum menggelapkan sepeda motor pelaku pernah menggelapkan mobil. Tapi saat itu pelaku tidak ditahan karena belum 1x24 jam pelaku sudah tertangkap dan korban berniat damai. "Tersangka ini bukan kali pertama melakukan penggelapan," tutupnya.(**wij**)

Sasar Hotel dan Biliar

ARIE/RB

RAZIA: Sat Reskrim Polres Kepahiang saat melakukan giat Operasi Pekat Nala II Tahun 2020 di sejumlah lokasi di Kecamatan Kepahiang, pada Senin (14/12) malam lalu.

Ops Pekat Nala II 2020

KEPAHIANG – Sebanyak 220 koin biliar dan sejumlah uang, dini hari kemarin (15/12) berhasil diamankan personil Sat Reskrim Polres Kepahiang dari lokasi permainan biliar di Desa Tebing Penyamun Kecamatan Tebat Karai. Selain mengamankan koin dan uang, aparat juga menyita sejumlah peralatan biliar yang kemudian diamankan ke Mapolres Kepahiang.

Kapolres Kepahiang AKBP Suparman, S.IK, M.AP melalui Kasat Reskrim Iptu Welliwanto Malau, S.IK, MH mengungkapkan, penyitaan yang dilakukan pihaknya tersebut dalam rangka giat Operasi Pekat Nala II Tahun 2020 yang dimulai sejak 11 Desember lalu hingga 20 Desember mendatang.

"Adapun sasaran utama dalam pelaksanaan Operasi Pekat Nala II tahun 2020 ini adalah penyakit masyarakat, yakni kegiatan yang meresahkan dan berpotensi menimbulkan gangguan terhadap situasi kamtibmas yang kondusif seperti minuman keras dan lain-lain," terang Welliwanto.

Selain menyasar ke sarana permainan biliar, dalam operasi ini Sat Reskrim Polres Kepahiang juga melakukan pemeriksaan di beberapa hotel di Kecamatan Kepahiang, yakni Hotel Yosi Abadi dan Hotel Mentari. Beruntungnya dari pemeriksaan di kedua hotel tersebut, tidak ditemukan pengunjung yang berbuat asusila atau tindak pidana lain.

"Operasi ini dilakukan sebagai upaya kepolisian meningkatkan keamanan dan kenyamanan ditengah masyarakat, oleh karena itu saya berharap agar seluruh elemen masyarakat juga dapat terlibat dan mendukung upaya kepolisian ini," pungkas Welliwanto. **(sly)**

Tersangka Penganiayaan Dibekuk Polda Bengkulu

BENGKULU – Tersangka penganiayaan berinisial YK (66) warga Jalan Merapi RT 1 Kelurahan Kebun Tebeng, harus mendekam di sel tahanan Mapolda Bengkulu. Dia ditangkap Tim Opsnal Jatanras Polda Bengkulu Senin (14/12) siang di rumahnya. YK diamankan lantaran diduga melakukan penganiayaan terhadap Hendra Saweria (37) warga RT 2 Kelurahan Bumi Ayu. Hal ini dibenarkan oleh Direktur Reskrim Umum Polda Bengkulu Kombes. Pol Teddy Suhendyawan Syarif, S.Ik, M.Si.

"Iya diduga pelaku penganiayaan sudah diamankan dan untuk mempermudah pemeriksaan YK saat ini ditahan di sel Tahanan Polda Bengkulu," katanya.

Diamankannya YK berawal dari laporan Hendra ke Polda Bengkulu pada bulan November lalu. Hendra ditugaskan Iksan Nasri untuk mengawasi Jaksa saat sidang lapangan di Air Sebakul. Selanjutnya Hendra ditelpon oleh seseorang agar pergi ke Kampung Bahari, karena banyak orang akan memagar lahan yang digarap oleh Hendra.

Singkatnya setiba di Kampung Bahari, Hendra mengetahui kalau YK dan kawan-kawannya akan memagari lahan yang digarap Hendra. Hendra langsung menanyakan kepada YK kenapa ingin memagar lahan yang di garapnya. Bukanya mendapatkan penjelasan, Hendra malah didorong oleh YK dan dipukul oleh beberapa teman YK. Akibatnya korban mengalami luka memar di bagaian mata kanan dan kiri, luka lebam di bagian tangan. (**wij**)

Dikeroyok Sebelas Orang

Korban Nyemplung ke Siring

BENGKULU – Harleni (36) warga Jalan Setia Negara RT 15 Kelurahan Kandang Mas kemarin (15/12) siang bersama Penasihat Hukum (PH) melaporkan dugaan pengeroyokan yang dialami suaminya ke Polres Bengkulu. Dugaan penganiayaan ini dilatar belakangi sengketa lahan. Diduga pelaku pengeroyokan itu berjumlah sebelas orang, atas suruhan salah seorang warga berinisial Is. Akibat kejadain tersebut korban mengalami luka di bagian muka dan sekujur tubuh. Kejadian ini berlangsung Selasa (13/12) sekitar pukul 10.00 WIB.

PH Pelapor yakni Bayu Purnomo Saputra, SH menjelaskan, kejadian penggeroyokan yang dialami oleh kliennya berawal saat John Albet sebagai korban sedang berada di pondok kebunnya di Jalan Setia Negara. Tiba-tiba datang sebelas orang mengunakan mobil, langsung menghampiri John.

Singkatnya, tanpa basa-basi salah satu dari pelaku langsung memukul korban. tidak hanya sampai di situ, diduga ada pelaku lainnya yang ikut memukul dan menendang korban. Sehingga korbanpun tersungkur dan masuk ke siring.

Usai melakukan pengeroyokan, pelaku langsung meninggalkan korban. Akibat dari kejadian tersebut korban terpaksa dirawat insentif di Rumah Sakit Gading Medika. "Klien kita mengarap lahan dan waktu itu, didatangi oleh sejumlah orang sekitar belasan orang dan Pak John dikeroyok dan tanamannya dirusak oleh diduga pelaku. Saat ini klien kita masih dirawat di rumah sakit," pungkasnya (**wij**)

Fahri Hamzah Batal Dapat Rp 30 M

FAHRI HAMZAH

JAKARTA – Niatan mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyumbangkan ganti rugi dari PKS kandas. Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali (PK) yang diajukan PKS soal tuntutan ganti rugi Rp 30 miliar untuk Fahri. Dengan demikian, PKS tidak wajib membayar tuntutan tersebut.

Meski urung mendapat ganti rugi, kuasa hukum Fahri Hamzah, Mujahid Latief, yakin kliennya tetap menang secara hukum. Dia menuturkan, putusan MA hanya membatalkan ganti rugi imateriil Rp 30 miliar. "PKS tetap dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum," tegas Mujahid kemarin (15/12).

Fahri sendiri tidak mempersoalkan putusan ganti rugi itu. Namun, dia menegaskan, kalaupun mendapat ganti rugi, uang itu tidak akan digunakannya sendiri. "Niatnya yang Rp 30 miliar itu mau disumbangkan," jelasnya.

Di sisi lain, PKS mengapresiasi putusan PK tersebut. "Secara prinsip kami tentunya sebagai tergugat di PN Jakarta Selatan yang selanjutnya menjadi pemohon PK menerima putusan ini," jelas Wasekjen Hukum dan Advokasi DPP PKS Zainudin Paru kemarin.

Zainudin menjelaskan, PK diajukan setelah Fahri Hamzah menggugat PKS atas pemecatan dirinya. Secara formal yuridis, lanjut dia, PK perlu ditempuh dalam upaya mendapatkan hak-hak perdata PKS sebagai partai politik.

Gugatan Fahri berawal dari keputusan PKS memecat dia dari keanggotaan partai itu. Dia menggugat pemecatan tersebut melalui Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Desember 2014 dan menang.

Begitu pula saat PKS mengajukan banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta hingga level kasasi di MA. Meski demikian, putusan kasasi yang mewajibkan PKS membayar Rp 30 miliar kepada Fahri akhirnya dibatalkan melalui putusan PK.

"Putusan (dibacakan) 25 November 2020," ungkap Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro. MA juga telah mengunggah putusan itu di laman direktori putusan. Andi menjelaskan, permohonan PKS dikabulkan sebagian. Yakni, tentang kewajiban membayar ganti rugi imateriil sebesar Rp 30 miliar.(**deb/syn/c17/byu**)

ALBERTUS/RIO/RB

BUKA KOTAK: KPU Kaur membuka kotak suara untuk persiapan pleno rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Pilkada serentak. Hingga tadi malam, pleno KPU masih berlangsung. Proses pleno tingkat kabupaten juga dilaksanakan KPU Bengkulu Selatan hingga tadi malam.

KPU Beri Kesempatan Paslon Menggugat

KOTA MANNA – Pleno rekapitulasi dan hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan (BS) hingga kabupaten telah selesai, tadi malam. Berdasarkan hasil pleno tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) hingga pleno KPU BS, tidak ada perubahan suara, dimana Paslon 03 Gusnan Mulyadi-Rifai Tajudin tetap mendapat suara terbanyak.

Paslon 03 meraih total 36.346 suara suara disusul Paslon 01 Hartawan-Darmin dengan 28.524 suara, Paslon 02 Budiman Ismaun-Helmi Paman 28.006 dan Paslon 04 Dewi Sartika-Marwan Iswandi 5.199 suara.

Dengan hasil ini, KPU BS mengukuhkan Paslon Gusnan-Rifai meraih perolehan suara terbanyak dalam Pilkada 09 Desember lalu. Akan tetapi, KPU BS belum menentukan Paslon terpilih, sebab masih ada tahapan lainnya yakni apabila ada Paslon lain yang menggugat.

Ketua KPU BS, Alpin Samsen, S.Pt mengatakan, pleno kabupaten telah dilakukan dan tidak ada masalah. Dimana hasilnya tidak berbeda dengan hasil pleno tingkat kecamatan. Suara terbanyak diraih Paslon 03. Menurutnya, KPU BS masih memberikan kesempatan apabila ada Paslon yang tidak terima dengan hasil pleno atau hal lainnya terkait Pilkada BS. Oleh sebab itu, pihaknya masih menunggu kalau ada gugatan dari para Paslon.

Namun, Alpin menegaskan, apapun masalah dan keluhan setiap Paslon harus dibuktikan dengan alat bukti yang benar-benar kuat. Sehingga proses tahapan pilkada tidak terhambat dengan gugatan-gugatan yang tidak mempunyai bukti. "Tentunya kalau ada kendala silakan sertakan dengan bukti dan alasan yang jelas," ujarnya.

Pantau Hasil dari Posko

Setelah menuntaskan pleno tingkat kecamatan atau PPK, kemarin (15/12) KPU Kaur mulai menggelar pleno rekapitulasi dan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten. Pleno digelar di GSG Pemkab Kaur. Sejak pagi ratusan personel polisi menjaga ketat lokasi GSG.

Rapat pleno tingkat kabupaten ini hingga pukul 22.00 WIB tadi malam masih berlangsung. Pantauan RB, para pendukung paslon yang ingin dekat ke lokasi pleno tidak bisa mendekat. Karena ketatnya penjagaan, sehingga banyak tim atau pendukung paslon 01 Gusril Pausi-Medi Yuliardi dan Paslon 02 Lismidianto-Herlian yang tidak bisa masuk. Mereka pun memilih menjauh namun tetap memantau lokasi gedung tempat berlangsungnya rapat pleno.

"Kita imbau para pendukung paslon ini untuk pulang dan memantau hasil pleno dari posko saja. Karena di sini sudah ada saksi-saksi yang dipercaya oleh setiap paslon untuk ikut pleno. Saya yakin mereka juga sudah memahami semua aturannya," kata Kapolres Kaur AKBP Dwi Agung Setyono,S.IK.

Sementara itu, Ketua KPU Kaur Meixxy Rismanto memastikan setiap paslon sudah menunjuk setiap saksinya masing-masing untuk hadir dalam pleno terbuka tersebut. (**tek/cik**)

STIA CETAK 315
WISUDAWAN/WATI TERBAIK

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bengkulu, Selasa (15/12) menggelar rapat terbuka wisuda sarjana ke XXXI. Kali ini STIA mewisuda 315 lulusan terbaik. Terdiri dari Fakultas Ilmu Administrasi Negara sabanyak 272 orang dan Fakultas Ilmu Administrasi Niaga sebanyak 43 orang. Kegiatan ini berlangsung di Aula Hotel Grage Bengkulu. Dibuka langsung oleh Ketua STIA Bengkulu Marjoyo, SE dan didampingi oleh Waka I Drs. Bambang Sutikno, M.Si, Waka II Gustini, SE,MM, Waka III By. Kasdi, S.Sos, MM, dan Ketua Jurusan Ovita Carolina, SE.

Kegiatan ini juga di hadiri oleh Gubernur Bengkulu yang dalam hal ini diwakili oleh Plt. Asisten 1 Povinsi Bengkulu Supran, SH. MH, Kepala LLDIKTI Wilayah II Palembang Dr. Nuril Furkan, M.Pd, Ketua Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu Dra. Hj. Zumratul Aini, seluruh dosen dan karyawan STIA Bengkulu dan peserta Wisuda.(**andre/prw**)

SAMBUTAN: Sambutan Ketua STIA Bengkulu Marjoyo, SE, MM sekaligus membuka acara rapat terbuka wisuda sarjana.

HADIR: Ketua STIA Bengkulu Marjoyo, SE didampingi oleh Waka I Drs. Bambang Sutikno, M.Si, Waka II Gustini, SE, MM, Waka III By. Kasdi, S.Sos, MM, dan ketua jurusan Ovita Carolina SE.

HIKMAT: Tampak haru dan bahagia pemindahan kucir salah satu peserta wisudawan dan wisudawati.

LAPOR: Laporan dari Ketua Jurusan STIA, Ovita Carolina, SE.

Sambutan Kepala LLDIKTI Wilayah II PalembangDr. Nuril Furkan, M.Pd

SERIUS: Tampak sangat serius seluruh Peserta wisudawan/wati membacakan ikrar wisuda

PROSESI: Tampak serius Peserta wisuda mengikuti proses acara wisuda

Sambutan dari Gubernur Bengkulu dalam hal ini di wakili oleh Asisten 1 Prov Bengkulu, Supran, SH, MH.

Sambutan dari Ketua Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu Dra. Hj. Zumratul Aini

PRESTASI: Foto Bersama mahasiswa berprestasi

Rakyat Bengkulu
METROPOLIS
RABU 16 DESEMBER | TAHUN 2020 | HALAMAN 9

4 Ribu Siswa Baru Tak Mau Seragam Gratis

BENGKULU – Bantuan baju seragam gratis bagi siswa baru SD dan SMP mulai dibagikan. Pembagian seragam gratis itu diberikan dalam bentuk buku tabungan Bank Bengkulu dan BPRS Fadilah. Untuk siswa SD mendapatkan buku tabungan yang berisikan uang Rp 480 ribu dan SMP Rp 550 ribu per siswa baru.

Pembagian buku tabungan ini dilakukan sejak Senin (14/12) lalu. Namun terpaksa dihentikan lantaran terjadi kerumunan. Pembagian akan dijadwalkan kembali, dan diantar langsung ke sekolah.

Dari data Dinas Pendidikan Kota Bengkulu, ada 10.000 ribu siswa baru tingkat SD dan SMP se Kota Bengkulu. Setelah dilakukan verfikasi hanya 6.000 siswa yang mendapatkan bantuan seragam gratis ini. Rinciannya 2.800 siswa SD dan 3020 siswa SMP. Alasannya karena hanya 6.000 siswa itu yang memberikan berkas ke Dinas Pendidikan. Yang berupa surat pernyataan orangtua kalau mereka kurang mampu. Surat pernyataan ini ditandatangani oleh orangtua di atas materai.

Sedangkan 4.000 siswa lainnya tidak mengembalikan berkas karena orangtua siswa itu tidak bersedia memberikan surat keterangan tidak mampu.

☞Baca ***4 RIBU..*** Hal 15

Teras

34 CPNS Terima SK Pengangkatan

BENGKULU – Sebanyak 34 CPNS formasi tahun 2019 di lingkungan Pemprov Bengkulu, hari ini (16/12) akan mendapatkan NIP dan Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai CPNS. Rencananya SK akan dibagikan langsung oleh Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, di Gedung Pola Provinsi Bengkulu.

Kepala BKD Provinsi Bengkulu Diah Irianti, mengatakan, NIP dan SK pengangkatan untuk 34 CPNS formasi tahun 2019 di lingkungan Pemprov Bengkulu sudah turun. Dijadwalkan, pagi ini (16/12) SK akan dibagikan oleh gubernur langsung kepada 34 CPNS Pemprov Bengkulu hasil seleksi tahun 2020. Status CPNS ke-34 orang ini Terhitung Mulai Tanggal (TMT) sejak 1 Desember.

"Januari awal mereka (34 CPNS baru ini) langsung mulai bekerja, dan juga per Januari sudah menerima gaji," kata Diah.

Untuk hak para CPNS ini nantinya, terang Diah, belum mendapatkan gaji 100 persen.

☞Baca ***34..*** Hal 15

Pekerja Konstruksi Wajib BPJS

BENGKULU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu bersama BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu menggelar Sosialisasi Surat Edaran (SE) Gubernur Tentang Kepesertaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Sektor Konstruksi, di Hotel ternama Kota Bengkulu, Selasa (15/12).

Sosialisasi tersebut dimaksudkan untuk menindaklanjuti adanya Peraturan Gubernur (Pergub) mengenai jaminan sosial dan juga surat edaran gubernur mengenai jasa konstruksi agar seluruh pekerja konstruksi memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Agar bila terjadi risiko sosial berkaitan dengan kecelakaan kerja dan juga kematian akibat dari pekerjaan yang mereka emban, para pekerja tetap mendapatkan haknya sebagai pekerja," jelas Asisten II Setda Provinsi Bengkulu Yuliswani, saat membuka secara resmi Sosialisasi Surat Edaran Gubernur, di Hotel ternama Kota Bengkulu, Selasa (15/12).

Lebih lanjut disampaikannya, dengan adanya Pergub tersebut, pemberi kerja wajib mendaftarkan seluruh pekerja nya di BPJS Ketenagakerjaan.

☞Baca ***PEKERJA..*** Hal 15

ILHAM/RB

PROYEK: Pengaspalan Jalan Alkausar Kelurahan Lingkar Barat beberapa waktu lalu.

2021, Minim Pembangunan

Anggaran Dinas PUPR hanya Rp 120 M

BENGKULU – Dinas Perkerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Kota Bengkulu tahun 2021 akan fokus pada pembangunan drainase. Karena pembangunan jalan dan lainnya sudah salesai tahun ini. Dimana tahun depan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) hanya mendapatkan anggaran sebesar Rp 120 miliar dari APBD. Nilai ini jauh dari jumlah anggaran tahun ini yang mencapai Rp 300 miliar lebih.

☞Baca ***2021..*** Hal 15

Percepat Realisasi Anggaran

BENGKULU – Pemprov diwakili Asisten III Setdaprov Bengkulu Gotri Suyanto mengikuti Rapat Koordinasi (rakor) evaluasi penyerapan APBD tahun 2020 bersama gubernur, bupati/walikota se-Indonesia secara virtual, Selasa (15/12). Dari evaluasi kemarin. Diketahui penyerapan APBD Provinsi Bengkulu masih di bawah rata-rata nasional.

"Posisi kita saat ini masih di bawah rata-rata nasional. Dari sisi realisasi pendapatan APBD Provinsi Bengkulu masih 81,17 persen dan belanja baru 73, 09 persen. Untuk itu perlu percepatan realisasi anggaran," kata Gotri usai mengikuti rakor kemarin.

Lanjutnya, mengingat penyerapan APBD tahun 2020 Pemprov Bengkulu dari evaluasi kemarin masih di bawah rata-rata nasional maka diminta dalam waktu sekitar 10 hari ini, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa mempercepat realisasi anggaran. Setiap OPD diminta untuk mengoptimalkan kinerja masing-masing walaupun masih di tengah pandemi Covid-19.

"Jadi dari sisa 10 hari ini, seluruh OPD diminta membuat jadwal perencanaan penyerapan anggaran. Sehingga di akhir tahun anggaran ini bisa lebih tinggi lagi. Kalau 2019 itu di 88 persen.

☞Baca ***PERCEPAT..*** Hal 15

IST/MCPEMPROV/RB

TERIMA AUDIENSI: Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah saat menerima audiensi Kepala Kanwil BPN/ATR Provinsi Bengkulu.

Pembangunan BISC Tunggu Izin Menteri

BENGKULU – Pemprov Bengkulu bakal membangun Bengkulu Internasional Sport Centre (BISC). Dikatakan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, tindaklanjut pembangunan BISC masih menunggu izin dari Kementerian ATR/BPN. Mengingat lokasi pembangunan ini rencananya berada di atas lahan Eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Bumi Rafflesia Indah (BRI).

☞Baca ***PEMBANGUNAN..*** Hal 15

YUNIKE/RB

IKUTI: Asisten III Setdaprov Bengkulu Gotri Suyanto saat mengikuti rakor evaluasi penyerapan APBD tahun 2020 secara virtual dengan Kemendagri RI, Selasa (15/12).

4 Ribu Siswa Baru Tak Mau ...

Sambungan dari hal 9

"Kalau aturanya memang seluruh siswa baru tetapi tetap harus ada persyaratannya yang harus dipenuhi. Sehingga ada sebagian siswa baru yang tidak dapat. Karena tidak melengkapi persyaratan. Salah satu syarat pernyataan kurang mampu dari orangtua. sebagian orangtua tidak mau menandatangi itu sehingga anaknya tidak bisa kita masukan," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Dra. Rosmayetti, MM melalui PPTK Novianto.

Selain surat keterangan tidak mampu, berkas yang harus dimasukkan antara lain, kartu keluarga, KTP orangtua, ada akta kelahiran siswa baru itu. Serta yang terpenting adalah siswa baru itu masuk dalam data pokok pendidikan (Dapodik).

Anggran yang telah disedaiakan untuk seragam gratis siwa baru itu sebesar Rp 3 miliar. Dengan uang itu, masing-masing siswa diminta membuat baju seragam merah putih bagi SD dan biru putih bagi SMP. Kemudian satu stel baju batik masing-masing sekolah.

"Syarat utama berkas jika tidak dia mendaftar tidak memberikan berkas maka tidak bisa dan juga bukan hanya terdampak Covid-19 tetapi juga bagi siswa miskin," ujarnya. (**juu**)

34 CPNS Terima SK ...

Sambungan dari hal 9

Gaji 100 persen baru diterima setelah mengikuti prajabatan dan mendapatkan SK PNS Sedangkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), meskipun masih berstatus CPNS tetap akan diberikan karena itu juga merupakan hak bagi CPNS. Begitupun dengan gaji ke-13 dan gaji ke-14 ketika ada kebijakan dari pemerintah pusat.

"Tidak boleh mengajukan pindah sebelum masa tugas mencapai 10 tahun, itu sudah perjanjian diawal ketika pemberkasan. Kita berharap nantinya CPNS baru ini bisa menunjukan kinerjanya dengan baik," papar Diah.

Sebelumnya, kelulusan ditentukan dari perangkingan hasil gabungan nilai SKD sebesar 40 persen dan SKB 60 persen, dari masing-masing formasi per unit kerja. Dari total 79 peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), 34 diantaranya dinyatakan lulus seleksi dari hasil perangkingan gabungan nilai SKD dan SKB dari 40 formasi yang diterima Pemprov Bengkulu. Sehingga dari 40 formasi yang diterima Pemprov Bengkulu, 6 tidak terisi karena tidak ada pendaftar. "Mengingat ini masih dalam kondisi pandemi, kita ingatkan bagi CPNS yang besok (hari ini, red) akan menerima SK dapat menggunakan masker," demikian Diah. (**key**)

Pekerja Konstruksi Wajib ...

Sambungan dari hal 9

Untuk itu, mantan Kabiro Ekonomi Setda Provinsi Bengkulu ini meminta kepada seluruh Kepala BPKAD kabupatrn/kota yang mengikuti sosialisasi, agar dapat memfilter dan memastikan sebelum kegiatan proyek dilakukan perusahaan jasa konstruksi telah membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerjanya.

Ditambahkan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu M. Imam Saputra, dengan sosialisasi ini diharapkan para kontraktor yang bekerja di bidang konstruksi dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. "Kita berharap dengan surat edaran Gubernur Bengkulu ini dapat meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari sektor konstruksi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.(**rls**)

Percepat Realisasi ...

Sambungan dari hal 9

Kalau ingin minimal sama dengan tahun lalu itu masih sekitar 15 persen lagi," jelas Gotri.

Sementara itu Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori dalam rapat kemarin mengingatkan, Pemda agar segera mempercepat realisasi APBD dalam kurun waktu 10 hari ke depan. Menurutnya, percepatan realisasi APBD di samping penanganan Covid-19 merupakan upaya gas dan rem pemerintah dalam menjaga keseimbangan negara pada dua isu utama, yakni kesehatan dan perekonomian.

Oleh sebab itu, realisasi APBD dianggap penting lantaran menjadi stimulus pendorong laju perekonomian Indonesia di tahun 2020. "2020 ini menjadi titik balik pertumbuhan membaik yaitu didorong realisasi belanja negara yang meningkat secara signifikan," demikian Hudori. (**key**)

Pembangunan BISC Tunggu ...

Sambungan dari hal 9

"Kita minta lahan eks BRI dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintahan. Pemprov sendiri berencana membangun BISC, DED sudah ada dan tahun depan mulai kita anggarkan," kata Rohidin usai menerima audiensi dengan Kepala Kanwil ATR/BPN Provinsi Bengkulu Mazwar di Gedung Daerah Balai Raya Semarak Bengkulu, Selasa (15/12).

Dalam pertemuan kemarin, sambung Rohidin, merupakan langkah mempertegas dukungan Kementerian ATR/BPN sebagai tindak lanjut pembangunan BISC, Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Bengkulu (Unib), Kawasan Ekonomi Kreatif, perkantoran dan hutan kota oleh Pemkab Benteng di Lahan Eks HGU PT BRI di Kabupaten Bengkulu Tengah, tepatnya di Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat.

Selain itu, rencananya juga akan menjadi lokasi pengembangan Brimob Polda Bengkulu, Korem 041/ Gamas Bengkulu, gedung rehabilitasi BNN dan pengembangan sekolah bagi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu. Sebelumnya Wakil Gubernur Bengkulu Dedy Ermansyah sudah melakukan rapat internal dan pihak Kementerian ATR/BPN meminta pemprov menyiapkan master plan dan komitmen penganggaran.

"Hari ini (kemarin, red) kita membahas kembali bersama Kepala Kanwil ATR/BPN Bengkulu. Nanti bisa menjadi pengembangan beberapa institusi dan perkantoran baru. Dan tentu akan menjadi pengembangan pusat kawasan pemukiman dan pertumbuhan ekonomi baru Bengkulu," paparnya.

Kepala Kanwil ATR/BPN Provinsi Bengkulu Mazwar menambahkan, pada prinsipnya pihaknya siap mendukung dan memfasilitasi pembangunan kawasan tersebut agar dapat memberi kemajuan bagi daerah. "Kita ATR/BPN Bengkulu akan menyiapkan hal tersebut dan memfasilitasi pertemuan dengan Menteri nantinya. Intinya kita siap mendukung kemajuan Bengkulu ini," tukas Mazwar. (**key**)

TIRTA DHARMA
LAYANAN SMS
PDAM
KOTA BENGKULU
Menghimbau pelanggan PDAM Kota Bengkulu membayar tagihan sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari sanksi hingga pemutusan.
Menghimbau melakukan pembayaran pada LOKET RESMI untuk menghindari penipuan.
UNTUK KELUHAN LAYANAN (HANYA SMS)
Mohon SMS kan ke 0821 8613 4569 sbb:
a. Nama /No.SL Pelanggan
b. Alamat lengkap dan nomor Hp
c. Laporan / keluhan
Mohon informasi ini disampaikan kepada pelanggan yang lain
"Kepuasan Pelanggan Komitmen Kami"

2021, Minim ...

Sambungan dari hal 9

Dana Rp 120 miliar tersebut, dibagi ke Bidang Sumber Daya Air (SDA) Rp 20 miliar, Bidang Bina Marga Rp 50 miliar dan Bidang Cipta Karya Rp 50 miliar. Selain fokus pembangunan drainase, Dinas PUPR juga melakukan perawatan pembangunan yang telah dibangun tahun 2020.

"Tahun depan pembanguan jalan sudah tidak banyak lagi. Tinggal kita bangun drainase dan perawatan," kata Plt Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu Noprisman.

Pada tahun 2020 PUPR melakukan pembangunan jalan yang menggunakan dana pinjaman BJB sebesar Rp 150 yang dibagikan dalam tiga paket. Paket satu Rp 50 miliar, paket dua Rp 41 miliar, paket tiga Rp 30 miliar. Sisanya di luar paket. Selain itu pembangunan gedung yang di kerjakan pada tahun 2020 yakni gedung fraksi, alun-alun Masjid At-Taqwa dan rehab Gedung Balai Adat.

"Pembangunan gedung habis, sudah selesai di dalam DPA juga tidak ada lagi," ujarnya.(**juu**)

Surya Ofiana, SE. M.Si
PD Kadis Perindag Provinsi Bengkulu

PERKEMBANGAN HARGA BAHAN PANGAN POKOK PASAR TRADISIONAL PROVINSI BENGKULU

	KOMODITI		SATUAN	HARGA (RP.)	KETERANGAN
1	BERAS	- IR 64 (Lokal Lampung)	kg	10.000	
		- IR 64 (Lokal Bengkulu)	kg	10.000	
		- Manggis Manis (Premium)	kg	12.500	
		- Kembang Kol (Premium)	kg	11.500	
		- Termurah	kg	9.375	
		- Cap Bulog/ Dolog	kg	9.375	
2	GULA PASIR	- DN	kg	12.500	
3	MINYAK GORENG	- Bimoli Kemasan	1 liter	15,000	
		- Tanpa Merk	1 liter	12.150	
4	DAGING	- Sapi Lokal Paha Belakang	kg	120.000	
		- Sapi Lokal Paha Depan	kg	120.000	
		- Sandung Lamur	kg	80.000	
		- Tetelan	kg	60.000	
		- Has Luar	kg	120.000	
		- Has Dalam	kg	120.000	
		- Daging Ayam Broiler	kg	34.000	Turun
		- Daging Ayam Kampung	kg	65.000	
5	TELUR	- Telur Ayam Broiler	kg	25.000	Naik
		- Telur Ayam Kampung	kg	52.500	
6	Cabe Merah Keriting		kg	42.000	
	Cabe Rawit Hijau		kg	25.000	
7	Bawang	- Merah	kg	35.000	
		- Putih	kg	26.000	
8	Susu Kental Manis	- Bendera	370 gr	11.000	
		- Indomilk	370 gr	10.000	
9	Garam	Beryodium Halus	kg	13.000	
10	Kacang	- Kedelai Eks Impor	kg	8.600	
		- Tanah	kg	25.000	
		- Hijau	kg	23.000	
12	Mie Instan	- Kari Ayam	bks	3.000	
13	Ikan	- Asin Teri	kg	60.000	
		- Kembung	kg	35.000	
		- Segar Tongkol/ Tuna	kg	25.000	
14	Ketela Pohon		kg	4.000	
15	Jagung Pipilan Kering		kg	7.000	

PERKEMBANGAN HARGA BARANG STRATEGIS KOTA BENGKULU

	KOMODITI	HARGA (RP.)	KETERANGAN
1	Semen 3 Roda	57.000	
2	Semen Holcim	57.000	
3	Semen Merah Putih	55.000	
4	Semen Padang	58.000	
5	Besi Beton 6 mm	30.000	
6	Besi Beton 8 mm	45.000	
7	Besi Beton 10 mm	67.000	
8	Besi Beton 12 mm	97.000	
9	Triplek 6 mm	95.000	
10	Kayu Balok 7/14 Bawang	100.000	
11	Kayu Balok 3/25 Bawang	100.000	
12	Paku 2 cm (1 inch)	20.000	
13	Paku 3 cm (1 1/2 inch)	20.000	
14	Paku 4 cm (2 inch)	17.000	
15	Paku 5 cm (2 1/2 inch)	17.000	
16	Paku 7 cm (3 inch)	17.000	
17	Paku 10 cm (4 inch)	17.000	
18	Pupuk KCL	7.000	
19	Pupuk NPK (Mutiara)	10.000	
20	Pupuk SP36	2.000	
21	Pupuk Urea	7.000	
22	Pupuk ZA	1.400	
23	Gas LPG 3 KG	18.000	
24	Baja Ringan	91.000	

Sumber : Pantauan Pasar Minggu, Pasar Panorama dan Pasar Barukoto

bank bengkulu
tangguh dan tumbuh
Kantor Pusat :
Jl. Basuki Rahmat No.6 Telp. 21503, 21751, 22144 Bengkulu

TABUNGAN

NAMA BANK	JENIS	SALDO	BUNGA/TH	KRITERIA
Bank Bengkulu	Tabot		1,00%	
	Simpeda	Rp. 0 s.d Rp. 500 Rb	0,50%	
		> Rp. 500Rb s.d Rp. 5 Jt	1,00%	
		> Rp. 5 Jt s.d Rp. 50 Jt	1,25%	
		> Rp. 50 Jt s.d Rp. 500 Jt	1,50%	
		> Rp. 500 Jt	2,00%	
	Tabunganku	Rp. 0 s.d Rp. 500 Rb	0%	
		> Rp. 500Rb s.d Rp. 1 Jt	0,25%	
		> Rp. 1Jt	1,00%	

DEPOSITO

NAMA BANK	1 BLN	3 BLN	6 BLN	12 BLN
Bank Bengkulu	5%	5%	5,25%	5,25%

ILHAM/RB

ATRIAN: Murid didampingi orangtua melakukan atrian pengambilan uang bantuan seragam, Senin (14/12).

Bayar Utang Rp 62 Miliar

BENGKULU – Pinjaman uang ke Bank Banteng-Jawa Barat (BJB) sebesar Rp 150 miliar untuk pembangunan jalan tahun ini, mulai dicicil pengembaliannya tahun depan. Tentu saja pengembalian pinjaman itu menyedot APBD hingga tiga tahun mendatang. Untuk itu Pemerintah Kota Bengkulu telah menganggarkan di APBD 2021 Rp 62 miliar untuk membayar bunga dan pokok utang.

"Dalam APBD 2021 sudah kita anggarkan Rp 62 miliar bunga dan pokok pinjaman, dalam rentang tiga tahun kedepan ditargetkan selesai," jelas Wakil Ketua I DPRD Kota Bengkulu Marliadi.

Pemkot telah mengajukan pijaman ke BJB sejak tahun 2019 yang direncanakan akan terealisasi pada awal tahun 2020. Namun karena adanya Covid-19 pinjaman tersebut sempat tertunda. Menjalang APBD Perubahan 2020 pemkot kembali mengajukan pinjaman ke BJB sebesar Rp 200 miliar yang diperuntukan pemasangan lampu jalan dan pembanguan jalan. Namun hanya disetujui BJB sebesar Rp 150 miliar. Sehingga pemasangan lampu jalan dibatalkan pengerjaannya tahun ini.

"Itu dari pagu pinjaman yang disetujui sebesar Rp 150 miliar, jika semuanya terserap maka pembayaran sebesar Rp 62 miliar kita perkiran tiga kali ansur selesai," ujarnya.

Dari pinjaman sebesar Rp 150 miliar dengan bunga sebesar 10 persen Pemkot Bengkulu membayar sebesar Rp 186 miliar. Dimana Rp 36 miliar merupakan pokok bunga.

"Sekarang pengerjaan masih berjalan. Nanti jika Rp 150 terserap, semua beban utang kita sebesar Rp 62 miliar pertahun. Kita berharap semuanya bisa terserap maksimal," terangnya.(**juu**)

Menpora Restui Gagasan Rohidin di Bidang Olahraga

BENGKULU - Langkah Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah untuk mewujudkan fasilitas olahraga bertaraf nasional di Provinsi Bengkulu terus dilakukan. Hal ini ditandai dengan seringnya Gubernur Rohidin melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pemuda dan Olahraga RI.

Termasuk tekad Rohidin untuk membangun stadion mini di setiap kecamatan di Provinsi Bengkulu terus diupayakan demi pembangunan SDM pemuda di bidang olahraga terwujud di masa depan.

"Sowan ini sifatnya mensinkronkan program kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Sehingga tahap demi tahap ke depan dapat lebih jelas, program apa saja yang dapat disinkronkan," jelas Rohidin yang kembali akan melanjutkan sebagai Gubernur Bengkulu, 15/12.

Lebih lanjut, bahasan terkait event-event olahraga nasional maupun wilayah menjadi perhatian agar Bengkulu dapat kembali menjadi tuan rumah event olahraga bergengsi. Kemudian, program pembinaan, kepelatihan untuk pemuda pemudi juga membutuhkan support pemerintah pusat.

"Kita ingin semua kegiatan olahraga di Bengkulu sinkron dengan program pemerintah pusat. Sehingga dalam penyusunan RPJMD kedepan dapat terukur dengan jelas. Kita juga ingin, program kepemudaan mendapat support dari pusat agar pemuda Bengkulu dapat mandiri dengan kreatifitasnya terbangun di era serba digital seperti sekarang," tutur Rohidin

Terakhir, tahap selanjutnya akan dilakukan koordinasi antar deputi kementerian, dan diikuti oleh Bappeda dan Dispora Provinsi.

"Pak Menteri sifatnya sudah menyetujui, tinggal langkah selanjutnya koordinasi tentang teknis antar deputi dan OPD terkait langkah apa yang bisa ditindak lanjuti," pungkas Rohidin.(**rls/mcprov**)

Virtual Meet up PLN, Patuhi Prokes

BENGKULU - Guna mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19, PT PLN (Persero) melalui Unit Induk Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu (UIW S2JB) tetap menjalin komunikasi dengan para awak media tiga provinsi. Meliputi, Sumatera Selatan, Jambi, serta Bengkulu. Bertajuk "Virtual Meet-up Bareng Media", acara yang dihadiri tidak kurang dari 70 awak media baik media cetak, media elektronik dan media online.

General Manager PLN UIW S2JB diwakili oleh Senior Manager SDM dan Umum, Ferry Bawan pun menyapa seluruh awak media peserta acara secara daring. Ia menyampaikan bahwa acara virtual meet-up itu dilaksanakan sebagai kepatuhan PLN terhadap protokol kesehatan yang berlaku, dengan tidak mengesampingkan kebutuhan korporasi untuk terus terkoneksi dengan media.

"Karena kondisi tahun ini dengan keterbatasan akibat pandemi Covid ini, maka kita laksanakan dengan sarana virtual, namun ini tidak mengurangi kebutuhan kami untuk terus terhubung dengan rekan-rekan media semua," kata Ferry.

Ia juga berharap agar pandemi dapat segera teratasi dan berakhir, sehingga kedepannya bisa kembali bertemu dan bertatap muka dengan awak media dalam kesempatan yang lebih baik.

Selanjutnya setelah pembukaan dilanjutkan dengan presentasi kondisi kelistrikan dan tanya jawab yang disampaikan oleh MSB Perencanaan. Dalam penyampaiannya, PLN UIW S2JB terdiri dari 6 Pelayanan di 3 Provinsi yaitu Sumatrera Selatan, Jambi dan Bengkulu dimana ada 3.572.7111 Pelanggan.

Selain itu juga, sistem kelistrikan di PLN Wilayah Sumatera Selatan Jambi dan Bengkulu memiliki daya mampu total 1970 MW dengan beban puncak total sebesar 1281 MW, sehingga masih memiliki cadangan yang cukup dalam mendorong pertumbuhan ekonomi," terangnya.

Dalam paparannya juga disampaikan bahwa rasio desa berlistrik meningkat tajam dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020. Dari 6.314 jumlah desa di WS2JB, seluruhnya telah dialiri listrik namun Hanya 6.173 Desa telah dialiri listrik oleh PLN sedangkan sebanyak 459 masih menikmati listrik Non PLN (Dialiri listrik secara swadaya, Pemda, Kementerian, LTSHE).

Diakhir acara dalam virtual meet up bareng media ini ditutup dengan kuis dan lomba challenge cerita bersama PLN dengan hadiah yang menarik. (**war/rls**)

Pembina Manajemen: DAHLAN ISKAN **Pemimpin Umum**: HM.MUSLIMIN (nonaktif), **General Manager/Penanggung Jawab**: MARSAL ABADI, **Wakil Pemimpin Umum/Manajer Personalia**: MUTIA AMPERIANA, **Pemimpin Perusahaan**: Hj. NURBAITI, **Wakil Pemimpin Perusahaan**: -, **Pemimpin Redaksi**: RIKY DWI PUTRA, **Redaktur Pelaksana**: PATRIS MUWARDI, **Redaktur**: SUMARLIN, HERI APRIZAL, FAZLUR RAHMAN, ADE HARYANTO **Wartawan Kota**: ANUGERAH WAHYU, IKSAN AGUS ABRAHAM, HASRUL, YUNIKE KAROLINA, WINDI JUNIUS, JIAFNI RISMAWARNI, ILHAM JULIANDI, **Wartawan di Daerah**: PERI HARYADI (Mukomuko), ARIE SAPUTRA WIJAYA (Kepahiang), M. RIZKI WAHYUDI (Seluma), ALBERTUS YUDI PRATAMA (Kaur), RIO AGUSTIAN (Bengkulu Selatan), TRI SHANDY RAMADANI (Bengkulu Utara), MUHARISTA DELDA (Lebong), WANDA FEBRIANDA (Rejang Lebong), JERI YASPRIANTO (Bengkulu Tengah), **Sekretaris Redaksi**: ANNA MARIYOHANA. **Pracetak**: SUTAMRIN (Kabag), FRAN SINATRA, ARI WIDARYANTO, HENDRA IRAWAN PUTRA, REFDIANTO, HEFFY JUNAIDI, **Teknologi Informasi (TI)**: ZULHAMDI, RUSDIYANTO **Manajer Iklan**: KOMI KENDY, **Account Executive (AE)**: WILMAN SITUMORANG, M. IRFANSYAH, DEVI ASTIKA, ADAM MALIK, RIKO PUTRA, AMALUDIN HAKIM, **Koordinator Penagihan Piutang Iklan dan Koran**: MARSAL ABADI, **Staf**: RIZKI NOVA AMELIA, FRANKY, HELEN, INDI SUDARTO, **Design iklan**: BOY RAHMAN HAKIM, VORWANTO, **Manajer Pemasaran**: HAZRIM, **Deputi**: MASRIYADI, **Staf Pemasaran**: SULISTI HARTINI, SIRHANUDIN, SAMRISMAN LUBIS, OZWARDI ARDIANSYAH, RUDI HARTONO, JULIMAN HAIDI. **Manajer Keuangan**: Hj. NURBAITI, **Deputi Manajer Keuangan**: AGUS SUWARSONO, **Accounting**: ELYA, SULUNG ERNAWATI, LUSIATI, **Event Organizer (EO)**: TUSDA ADHAM, BETTY HERLINA, **Divisi Anak Perusahaan**: SUKATNO, M FIRDAUS, JEFRI GINTING, M RASUL, SOPYAN ARDI, SUMANTRI, WARSIMAN, ERWIN ABENDI, HERU PP, MARSAL ABADI, DASPAN HARYADI, BAHMAN HADI, KARTUBI, M BASIR, WIRO IDRUS SALAM, NANANG SETIAWAN, DITA ASFANI, SUSANTO, PURNAMA SAKTI, SYAHBANDAR, AZMALIAR ZAROS, ARJUNA WIWAHA. **Penerbit**: PT BENGKULU SEMARAK PERMAI, **Komisaris Utama**: HM ALWI HAMMU, **Komisaris**: DWI NURMAWAN, LUKMAN SETIAWAN. **Direktur Utama**: H SUPARNO WONOKROMO. **Direktur**: HM. MUSLIMIN, MH, **Coorporate Lawyer Jawa Pos Group/Harian Rakyat Bengkulu**: Dr. Harris Arthur Hedar, SH, MH, **Alamat Redaksi/Pemasaran/Iklan**: Graha Pena Rakyat Bengkulu Jalan P Natadirdja No. 69 KM 6,5 Bengkulu. **Telepon** (0736) 20882, 22060, 341694, 344754, 346771 **Faximile** (0736) 346770 **Perwakilan Jakarta**: Graha Pena Jakarta Lantai 6 JalanRaya Kebayoran Lama No. 16 Jakarta. (021)-53699581 **Fax** (021) 53651427 **Percetakan**: PT BENGKULU SINAR GRAFIKA, **Manajer Percetakan**: - , **Operasional Percetakan**: JOKO SANTOSO, MAWARDI, ARI YULIZAR, MESTA DOMIZA, HERMAN, TRIONO WIJAYA, MARSUDI, MEDI PURWANTO, APRIANDONI, HENDRI SAPUTRA, AGUNG SYAPUTRA, SAIWAN, **Alamat Percetakan**: Jalan WR Supratman RT 01 Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Telepon 082180191842.**Tarif Iklan**: Display (umum) Rp.47.500/mmk, sosial/keluarga/pendidikan, film, dan ucapan selamat Rp 25.000/mmk, iklan baris/mini Rp 5.500/baris (min 3 baris, max 10 baris). Warna (minimal 1/4halaman) Rp 48.000/mmk satu warna, Rp 53.000/mmk (2 warna), dan Rp.62.500/mmk (full colour). Harga eceran Rp 6.000/eks, langganan Rp 165.000, luar kota tambah ongkos kirim.
- Wartawan Rakyat Bengkulu dilarang menerima uang maupun barang dari sumber berita - Wartawan Rakyat Bengkulu dalam menjalankan tugas dibekali kartu identitas. - Isi di luar tanggung jawab percetakan.

LINTAS

Turunkan Tim Yustisi Cek Legalitas Reklame

AMEN - Anggota DPRD Kabupaten Lebong, Mahdi, S.Sos mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong segera menginventarisir legalitas reklame yang ada di Kabupaten Lebong. Dalam menginventarisir mana saja reklame yang berizin dan yang belum berizin, Pemkab Lebong harus menurunkan tim yustisi yang dikomandoi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

''Hasil pendataan tim yustisi itulah yang disonding dengan data izin reklame yang telah dikeluarkan DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu, red), pasti akan ketahuan mana saja reklame yang legal dan ilegal," kata Mahdi.

Terhadap reklame yang tidak punya izin alias ilegal, Pemkab tidak berhak melakukan pungutan. Soalnya besarnya tarif reklame disesuaikan dengan jenis dan ukuran reklame yang dipasang sebagaimana tertera dalam izin. Justru itu, penertiban reklame tak berizin harus dilakukan sesegera mungkin sebagai upaya meminimalisir kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). ''Kalau Pemkab Lebong tidak punya data reklame yang berizin, bagaimana bisa mendongkak PAD dari pos itu (reklame, red)," tukas Mahdi.

Dijelaskannya, izin dan pajak reklame itu telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame. Termasuk Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah. Kedua Perda itu menjelaskan, setiap penyelenggara reklame yang bersifat komersil wajib membayar pajak dan mengantongi Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR). ''Bahkan dalam pasal 17 Perda Nomor 3 Tahun 2013 dijelaskan soal sanksi pembongkaran terhadap reklame yang tidak berizin," terang Mahdi.

Sementara Kabid Pendapatan dan Bagi Hasil, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Lebong, Rudi Hartono, SE, M.AK mengaku Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak reklame masih sangat minim. Dari potensi ratusan juta rupiah, sejauh ini yang terpungut oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong belum sampai Rp 50 juta per tahun. Itu karena masih sedikit reklame yang mengantongi izin. ''Kalau sesuai data dari DPMPTSP, izin reklame yang dikeluarkan belum sampai seratus unit," ujar Rudi.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Lebong, Bambang ASB, S.Sos, M.Si belum berhasil dikonfirmasi. Namun pernah disampaikannya, kewenangan DPMPTSP hanya sebatas mengeluarkan izin. Itupun setelah ada rekomendasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagaimana yang disyaratkan dalam penerbitan izin. Antara lain rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Namun yang terjadi selama ini reklamenya sudah lebih dulu dipasang, baru pemiliknya mengurus izin ketika turun teguran.

Begitu juga DLH hanya berwenang mengeluarkan rekomendasi untuk perizinan pemasangan reklame. Jika reklamenya sudah terpasang, logikanya tidak perlu lagi rekomendasi dari DLH. Atas kondisi ini, pihak DPMPTSP sempat menawarkan solusi ke Pemkab Lebong untuk mengeluarkan diskresi khusus terhadap reklame yang sudah terpasang dan belum punya izin sepanjang reklame itu tidak mengganggu masyarakat.**(sca)**

Jangan Kambinghitamkan Covid-19

PELABAI - Kabid Pendapatan dan Bagi Hasil, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Lebong, Rudi Hartono, SE meminta masyarakat segera menjalankan kewajibannya membayar Pajak Bumi Bangunan sektor Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2). Soalnya sampai saat ini progres setoran PBB-P2 belum sampai 80 persen dari target Rp 1,4 miliar.

''Sekarang tidak ada lagi alasan wajib pajak keberatan membayar PBB-P2 karena nilai yang terlalu besar. Apalagi mengaitkannya atau mengkambinghitamkan pandemi Covid-19 sebagai dalih tak bayar PBB-P2," kata Rudi.

Soalnya masa protes atau keberatan bagi wajib pajak sudah diberikan Bidang Aset dengan tenggat 1 bulan sejak Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dibagikan. Kepada para kepala desa dan lurah, diharapnya semakin proaktif membantu pemungutan PBB-P2 karena sisa waktu tutup anggaran tinggal 14 hari. ''Kalau sampai tidak terbayar, akan menjadi temuan piutang oleh BPK (badan pemeriksa keuangan, red)," terang Rudi.

Selama masa protes bagi wajib pajak yang keberatan nilai PBB-P2 yang ditetapkan, versi Rudi, tidak ada satupun yang mengajukan. Artinya seluruh wajib pajak setuju dengan nilai yang ditetapkan. Terlebih penetapan nilai pajak itu tidak sembarangan. Namun disesuaikan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).(**sca**)

ARIS/RB

PLENO: Suasana pleno rekapitulasi suara di KPU Lebong berlangsung hingga tadi malam (15/12).

Saksi 2 Paslon Tidak Hadir

Kopli-Fahrurrozi Pemenang Pilkada

PELABAI - Dari 4 pasangan calon (paslon) peserta Pemilihan Bupati (Pilbup) Lebong, hanya 2 paslon yang mengirimkan saksi untuk hadir dalam pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebong, kemarin (15/12). Masing-masing paslon yang menghadirkan saksi adalah paslon nomor urut 3, Kopli Ansori-Fahrurrozi dan paslon nomor urut 4, Teguh Raharjo-Nasirwan.

Sementara paslon nomor urut 1, Dalhadi Umar-Wawan Fernandez dan paslon nomor urut 2, Armansyah Mursalin-Masropen Irihadi, tidak mengutus saksi. KPU tidak tahu persis mengapa kedua paslon itu tidak menghadirkan saksi dalam pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten. ''Yang jelas kami sudah mengundang masing-masing paslon menghadirkan dua orang saksi dalam pleno hari ini (kemarin, red)," kata Ketua KPU Kabupaten Lebong, Shalahuddin Al Khidr, SE.

Baik tim pemenangan Armansyah-Masropen maupun Dalhadi-Wawan, belum berhasil dikonfirmasi. Terpisah, Agustam Rachman, SH, MAPS selaku tim kuasa hukum Kopli-Fahrurrozi mengatakan, tidak adanya saksi yang diutus kedua paslon akan melemahkan posisi kedua paslon itu sendiri. Dalam artian tidak bisa menyampaikan hak keberatannya atas rekapitulasi suara yang dilakukan berjenjang oleh KPU. ''Namun terlepas apapun alasannya, dapat diartikan kedua paslon itu menerima hasil yang ditetapkan KPU," ungkap Agustam.

Untuk rekapitulasi sendiri, hingga pukul 20.23 WIB tadi malam baru berjalan untuk 11 dari 12 kecamatan. Posisinya tinggal menunggu rekapitulasi suara Kecamatan Pinang Belapis. Dari data sementara hasil rekapitulasi di 7 kecamatan, sesuai hasil pantauan RB, posisi suara masih dipimpin Kopli-Fahrurrozi. Artinya sudah dipastikan Kopli-Fahrurrozi pemenang Pilkada Lebong.(**sca**)

2021, Kembali E-Absensi

PELABAI - Sistem absensi PNS berbasis elektronik atau e-Absensi akan kembali diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong mulai tahun 2021. Namun kapan waktunya belum bisa dipastikan karena Pemkab Lebong masih harus menyempurnakan segala kekurangan yang menjadi kendala selama diterapkan 1 September hingga 13 Oktober lalu.

''Nanti akan kami komunikasikan lagi dengan Pak Bupati, kapan mulai diterapkan," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lebong, H. Mustarani Abidin, SH, M.Si.

Dijelaskannya, tujuan utama penerapan e-Absensi adalah untuk meningkatkan disiplin PNS. Termasuk meminimalisir kebocoran anggaran untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Itu karena dengan peralatan penunjang serta aplikasi e-Absensi, data absensi PNS tidak bisa dimanipulasi. ''Itu artinya TPP yang dibayarkan untuk PNS disesuaikan dengan tingkat disiplin dan beban kerja PNS bersangkutan," terang Sekda.

Tidak stabilnya arus listrik yang menjadi kendala sebagaimana laporan hampir merata Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Lebong, dipastikan Sekda akan segera teratasi. Dalam waktu dekat pihaknya akan koordinasi ke Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Muara Aman untuk memastikan tidak adanya kekurangan daya listrik di Kabupaten Lebong. ''Termasuk jaringan internet dan peralatan penunjang lainnya, akan lebih dimaksimalkan agar dalam penerapan selanjutnya tidak ada lagi kendala," tegas Sekda.

Namun terkait masalah pandemi Covid-19 yang mana peralatan finger print dikhawatirkan menjadi klaster baru penularan Covid-19, Sekda akui tidak akan menjadi permasalahan. Soalnya sistem scan data personal PNS, tidak harus menggunakan sidik jari. Melainkan bisa menggunakan scan wajah dan itu sudah diterapkan saat pertama e-Absensi diberlakukan Pemkab Lebong 1 September. ''Tidak bisa dipungkiri, dengan semakin maraknya Covid-19 setiap pemerintah daerah harus menyesuaikan gaya hidup baru yang salah satunya mematuhi protokol kesehatan," ungkap Sekda.

Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) Kabupaten Lebong, Donni Swabuana, ST, M.Si memastikan dengan penggunaan aplikasi e-Absensi tidak ada celah lagi bagi siapapun untuk melakukan manipulasi data kehadiran. Termasuk data laporan kinerja, tidak dapat dimanipulasi karena aplikasi e-Absensi langsung terintegrasi dengan aplikasi e-Kinerja dan e-TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) dalam satu server. ''Mulai dari absensi sidik jari atau wajah, sistem pelaporan kinerja PNS akan dibuat berbasis website android yang tersambung dengan jaringan internet dan terintegrasi," tandas Donni.**(sca)**

Belum Juga Dibahas

APBD 2021 Terancam Disamakan

ERIK ROSADI

PELABAI – Bila hingga Desember ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong tidak juga mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021, dipastikan nilai APBD 2021 sama dengan pengeluaran daerah atau nilai belanja tahun ini. Itu artinya nilai APBD 2021 akan ditetapkan sebesar Rp 735,5 miliar sebagaimana angka Belanja Tidak Langsung (BTL) tahun ini senilai Rp 392,7 miliar dan Belanja Langsung Rp 342,8 miliar.

Pelaksana Tugas (Plt) kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Lebong, Erik Rosadi, S.STP, M.Si tidak menampik ancaman nilai APBD Lebong tahun depan disamakan dengan belanja tahun ini. Itu jika hingga 60 hari sejak disampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), kepala daerah tidak mengambil persetujuan bersama. Artinya Bupati Lebong harus menindaklanjutinya dengan menyusun Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup). ''Dalam Raperbup APBD itu paling tinggi sebesar angka APBD sebelumnya," kata Erik.

Aturan itu sudah dijabarkan dalam pasal 107 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun terkait ancaman bagi kepala daerah beserta DPRD yang tidak akan menerima gaji selama 6 bulan karena tidak mampu mengesahkan APBD 2021 sesuai batas akhir 30 November, Erik enggan berkomentar. ''Kalau soal itu, bukan ranahnya saya," tukas Erik.

Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Kabupaten Lebong, Indra Gunawan, M.Si memastikan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) akan dibahas Badan Anggaran (Banggar) DPRD hari ini. Itu sesuai jadwal yang telah disusun Badan Musyawarah (Banmus) DPRD. ''Mudah-mudahan realisasinya tidak bergeser dari jadwal," ujar Indra.(**sca**)

Pleno KPU, Jurnalis Dilarang Masuk

MUKOMUKO – Ada-ada saja. Rapat pleno terbuka penghitungan suara Pilgub maupun Pilbup oleh KPU, sempat tertutup untuk jurnalis. Pleno yang berlangsung di aula salah satu hotel itu, kemarin (15/12), tidak satupun wartawan diperbolehkan masuk ke dalam ruangan.

Kondisi itu berlangsung mulai dari pembukaan, hingga dimulainya penghitungan suara untuk Pilgub Bengkulu. Hal ini diketahui, setelah sejumlah jurnalis dari koran harian, online dan elektronik, akan meliput kegiatan rapat pleno.

Setelah melalui negosiasi yang alot, akhirnya jurnalis diperbolehkan masuk, namun dengan pengawasan ketat aparat. Diceritakan Amris Tanjung, wartawan Radar Mukomuko saat ia bersama beberapa wartawan masuk ke ruang pleno, dihadang oleh petugas jaga. Dinyatakan bahwa wartawan dilarang masuk untuk melakukan peliputan.

"Pas mau masuk ditanya id card. Saya sampaikan id card sebagai wartawan, tapi tetap ditolak, tidak diperbolehkan masuk," ujar Amris yang mantan Ketua PWI Mukomuko ini.

Ia menyayangkan kejadian tersebut. Padahal pleno itu dinyatakan terbuka. Terkait dengan id card khusus bagi awak media, dinyatakan Amris tidak ada diberikan oleh KPU. Padahal pada acara-acara sebelumnya yang diselenggarakan KPU Mukomuko, selalu sehari sebelum acara sudah disediakan id card dan diserahkan ke wartawan.

"Tidak ada Id Card hingga hari pelaksanaan. Jadi wajar saja, kalau saya dan kawan – kawan datang ke lokasi rapat tidak menggunakan Id Card yang dikeluarkan oleh KPU," kata Amris.

PERI/RB

PLENO KPU: Kegiatan pleno KPU Mukomuko yang masih berlangsung hingga tadi malam (15/12).

Ketua PWI Mukomuko, Budi Hartono, SP sangat menyayangkan kejadian tersebut. Setelah mendapati informasi demikian, ia pun langsung datang ke lokasi kegiatan untuk memastikan kondisi sebenarnya.

Awalnya, Budi mendatangi petugas di depan pintu masuk untuk mengisi buku tamu. Setelah itu ia diperiksa petugas jaga untuk memastikan tidak ada barang berbahaya yang dibawa saat akan masuk. Setelah lolos pemeriksaan, pihaknya langsung menuju pintu masuk ruang rapat pleno.

"Sampai pintu masuk, kami dihadang petugas dari kepolisian. Petugas itu menyampaikan bahwa tanpa Id Card dari KPU, tidak boleh melakukan peliputan. Saya sempat bertanya kepada petugas dari kepolisian, soal tidak bolehnya wartawan meliput pleno hingga selesai dan apa aturannya. Oknum petugas itu menjawab, kalau komplain, silakan tanya KPU. Saya hanya menjalankan tugas. Itu kata oknum polisi kepada saya," sampai Budi, meskipun akhirnya diriya diperbolehkan masuk, namun hanya untuk pengambilan dokumentasi dan dipersilahkan untuk keluar kembali dari ruangan tersebut.

Ketua KPU Mukomuko Irsyad, dikonfirmasi mengenai ini, menyatakan kegiatan boleh diliput langsung wartawan. Mengenai id card khusus dari KPU, akan disiapkan pihaknya segera. "Boleh masuk, ini saya perintahkan staf untuk mencetak Id Card untuk kawan-kawan wartawan," sampai Irsyad yang turut dibenarkan Budi, usai kembali dari lokasi kegiatan.

Sekitar pukul 11.15 WIB, salah satu staf KPU Mukomuko mendatangi Sekretariat PWI Mukomuko menyerahkan sejumlah id card khusus dari KPU untuk wartawan meliput kegiatan dimaksud. Lantaran baru diberikan, sejumlah wartawan tetap merasa kesal dan memilih enggan datang ke lokasi.

"Rapat pleno dimulai pukul 09.00 WIB pagi. Kami baru diberikan Id Card pukul 11.15 WIB siang. Sama saja bohong. Kejadian seperti ini jangan lagi sampai terjadi," sesal wartawan Harian Radar Utara, Wahyudi, SH.

Sementara beberapa wartawan yang mencoba masuk ke lokasi, dengan menggunakan id card tersebut, dipermudah untuk masuk. Namun tetap sebelum masuk ruangan petugas dari kepolisian mengingatkan hanya boleh untuk mengambil dokumentasi. Tidak boleh berlama di dalam ruangan, apalagi meliput jalannya pleno.(**hue**)

Sapi Dilepasliarkan, Rentan Jembrana

MUKOMUKO – Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Mukomuko, Warsiman, S.Pt, M.Si menyatakan kasus jembrana yang menyerang ternak sapi milik warga Mukomuko mayoritas ternak sapi yang dilepasliarkan oleh pemiliknya. Dan ini sudah terbukti di beberapa kecamatan yang mengalami kejadian demikian,

"Terbaru di wilayah Kecamatan Teras Terunjam dan Kecamatan Pondok Suguh. Itu mayotitas ternak sapi yang dilepasliarkan atau tak dikandangkan pemiliknya. Karena ternak sapi yang diliarkan itu gampang tertular virus dari ternak sapi yang lainnya," sampai Warsiman.

Selain ternak sapi diliarkan, kasus jembaran juga mendominiasi terhadap ternak yang baru dibeli pemiliknya dari luar daerah. Ada yang dari daerah Sumatera Barat, dan dari daerah lainnya. "Seharusnya saat warga akan membeli ternak sapi dari luar daerah, bisa melibatkan petugas kesehatan hewan," katanya.

Tujuannya, sebelum sapi itu dibayar, petugas bisa mengecek kondisi kesehatan ternak itu sendiri. Kalau sehat, silakan bayar dan kalau tidak sehat, sebaiknya tidak dibeli. "Namun yang terjadi sekarang tidak demikian, warga lebih banyak terpancing dengan harga yang murah. Itulah sebabnya, sapi yang baru dibeli warga juga banyak yang terserang jembrana," jelasnya.

Sedangkan untuk ternak yang bener- benar dipelihara dengan cara dikandangkan, jarang terserang virus jembaran dan virus lainnya. Sebab, lanjut Warsiman, ternak yang dikandangkan itu rutin mendapatkan vaksin dari petugas kesehatan hewan.

"Petugas hanya melakukan vaksinasi kepada ternak yang dikandangkan. Sedangkan ternak yang diliarkan, rata-rata tidak diberikan vaksinasi karena sulit ditangkap pemiliknya. Maka dari itu, sapi yang di kandangkan pemiliknya jarang terkena virus jembrana," katanya.

Selain pemberian vaksin, untuk mencegah terjadinya serangan virus jembrana maka pemilik ternak harus rajin membersihkan kandang serta menyemprotkan disinfektan di kandang ternak minimal sebulan sekali.

"Dengan kandang yang bersih dan rutin memnyemprot disinfektan maka pencegahan penyebaran virus jembrana dapat diantisipasi dengan baik,' sampainya.

Dan masyarakat perlu ketahui, untuk kasus terbaru, setidaknya lebih dari 20 ekor sapi milik warga di Kecamatan Teras Terunjam dan Pondok Suguh, mati akibat terserang jembrana.

"Mari sama-sama kita hentikan laju kasus jembrana dengan cara tidak meliarkan ternaknya, dan rajin membersihkan dan menyemprotkan disinfektan," tukasnya. (**hue**)

Pertahankan Kemenangan, Sapuan Siapkan Pengacara

Final Perolehan Suara Pilbup Mukomuko Pelno KPU			
No	Kecamatan	Paslon Bupati Mukomuko	
		1	2
		H. Choirul Huda - Rahmadi AB	H. Sapuan - Wasri
1	Air Dikit	1357	2075
2	Air Manjuto	4328	2324
3	Air Rami	4210	2746
4	Ipuh	3728	5049
5	Kota Mukomuko	2742	6566
6	Lubuk Pinang	3121	4231
7	Malin Deman	2164	1162
8	Penarik	5412	7437
9	Pondok Suguh	2175	3551
10	Selagan Raya	1606	4024
11	Sungai Rumbai	2780	1867
12	Teramang Jaya	1247	5379
13	Teras Terunjam	1753	2502
14	V Koto	1234	2655
15	XIV Koto	3882	3544
	Jumlah	41739	55112
	Selisih Suara		13373
	DPT		124418
	Jumlah Suara		96851
	Selisih DPT		27567

IST/RB

BERSIAP: Ketua Tim Pemenangan Pasol 02, Nasir Ahmad menyatakan, pihaknya bersiap jika nantinya ada gugatan dari Paslon 01.

MUKOMUKO – Paslon 02 Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko H. Sapuan – Wasri berhasil menang besar di Pilkada Mukomuko 2020. Baik itu versi hitungan cepat, maupun hasil Pleno tingkat KPU Mukomuko, tadi malam. Sapuan-Wasri menang telak, unggul di 10 kecamatan dari 15 kecamatan se-Kabupaten Mukomuko.

Kemenangan terbesar diraih paslon 02 di empat kecamatan, yakni Kota Mukomuko, Penarik, Selagan Raya dan Teramang Jaya. (lihar grafis. Tidak ingin kemenangan itu nantinya kandas, lantaran adanya gugatan dari Paslon 01 H. Choirul Huda – Rahmadi AB yang dapat membatalkan kemenangan, Sapuan menyiapkan pengacara.

Pengacara atau lawyer yang disiapkan tentu yang sudah berpengalaman dalam menghadapi dan menangani gugatan hasil Pilkada. Sebagaimana dikemuka Ketua Tim Pemenangan Paslon 02, Nasir Ahmad, kemarin.

"Pak Sapuan sekarang sedang di Jakarta, salah satunya dalam rangka itu (menyiapkan pengacara). Kalau-kalau ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tentu kita gunakan lawyer. dengan mencari lembaga di Jakarta yang berpengalaman menghadapi gugatan Pilkada," ujar Aat—begitu sapaan Nasir Ahmad.

Dia menyebutkan lebih memilih pengacara atau lembaga yang berada di Jakarta, selain pertimbangan lebih kompeten juga dengan pertimbangan efektivitas. Dengan lembaga yang berdomisili di Jakarta, bisa kapanpun bersidang tanpa perlu menghabiskan waktu di jalan, Bengkulu-Jakarta. "Sengaja di Jakarta. Di sana kita nilai lebih kompeten dan lebih efektif. Karena kita cukup kirimkan data dari sini," ujarnya.

Sejauh ini pihaknya belum mendapat informasi bakal ada gugatan dari lawan. Hanya saja, dalam konteks Pilkada, gugatan dari tim lawan merupakan hal lumrah. "Wajar kalau dari pihak yang menang, mempersiapkan diri menghadapi gugatan," imbuhnya.

Selain siap menghadapi gugatan, Aat pun menyatakan pihaknya siap melayangkan gugatan. Hanya saja, untuk sementara ini, niat tersebut diurungkan. Selagi Paslon 02 tidak dirugikan, maka upaya gugatan tidak akan dilakukan.(**hue**)

Poliklinik Tutup, Seluruh Nakes Swab

MUKOMUKO – Seluruh tenaga kesehatan (Nakes) di RSUD Mukomuko wajib menjalani tes swab. Mulai dari jajaran manajemen, dokter, perawat dan nakes lainnya. Termasuk di swab karyawan RSUD bidang lainnya. Ini dinyatakan Direktur RSUD Mukomuko, dr. H. Tugur Anjastiko.

Langkah ini kata Tugur setelah diputuskan seluruh layanan poliklinik di RSUD Mukomuko ditutup hingga batas waktu yang belum ditentukan. "Seluruh layanan poli kita stop. Hanya UGD dan rawat inap yang masih dibuka," kata Tugur.

Mengenai wajib Swab lanjut Tugur, merupakan tindaklanjut dari enam kesepakatan yang dihasilkan dari rapat antara manejemen, komite medik, bidang keperawatan, bidang pelayanan medis. Diantara kesepakatan itu, bahwa akan dilakukan swab seluruh karyawan RSUD Mukomuko.

Berikutnya, pelaksanaan swab dilakukan secara bertahap. Mengingat keterbatasan tenaga Lab dan VTM. Selain itu, kesepakatan berikutnya, dalam pelaksanaan swab, karyawan tetap melaksanakan aktivitas seperti biasa. Tentunya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19.

Kemudian, bagi karyawan yang hasil swab sudah keluar, dan berstatus negatif, maka karyawan itu tetap masuk kerja seperti biasa. Sedangkan untuk karyawan yang hasil swabnya positif, wajib melaksanakan isolasi mandiri. Terakhir, baik karyawan yang hasil uji swab negatif dan swab positif, akan dilakukan swab berkala. "Ini sudah dirapatkan dan disepakati, sehingga ada enam poin keputusan terkait hasil swab tenaga kesehatan," kata Tugur.

Kebijakan ini setelah sebelumnya ada sejumlah Nakes di RSUD Mukomuko positif terpapar Covid-19. "Hasil swab menyatakan bahwa beberapa tenaga kesehatan di RSUD ada yang positif terpapar Covid-19," kata Tugur.

Terkait penutupan poli, disebut Tugur sebagai langkah antisipasi penyebaran Covid-19. Terutama di lingkungan Nakes dan RSUD Mukomuko. Agar pelayanan medis masih tetap dilaksanakan. "Hanya buka untuk pelayanan rawat inap dan IGD," pungkasnya.

Juru Bicara Satgas Penanggulangan Covid-19 Mukomuko, Bustam Bustomo, SKM mengatakan hingga 14 Desember 2020 ada penambahan kasus Covid-19 di Mukomuko. Dari 14 kasus ini mayoritas merupakan tenaga kesehatan di RSUD Mukomuko.

"Total kasus positif di Mukomuko kini sudah sebanyak 134 kasus. Dari jumlah itu, sebanyak 115 orang sembuh, 5 meninggal dunia. Saat ini masih ada 14 pasien jalani isolasi mandiri," demikian Bustam.(**hue**)

Besok, Mantan Kades Divonis Perkara Korupsi

MUKOMUKO – Jika tidak ada aral melintang, mantan Kepala Desa (Kades) Bukit Harapan Kecamatan Air Rami, BH bakal divonis majelis hakim Tipikor Bengkulu pada sidang Kamis (17/12) ini. Sebelumnya, sidang dengan agenda pembacaan pleidoi (pembelaan) dari terdakwa. "Kamis kelak pembacaan putusan (vonis) oleh majelis hakim," kata Kasi Pidsus Kejari Mukomuko, Andi Setiawan, SH.

Andi optimis majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan korupsi. Itu didasari bukti-bukti yang telah dikemukakan di persidangan.

Dalam perkara ini, JPU kata Andi, menuntut terdakwa dengan pidana kurangan penjara setahun empat bulan. Penjatuhan denda uang sebesar Rp 50 juta. Bila tidak dibayarkan terdakwa, hukuman kurunganditambah tiga bulan.

"Selain itu, JPU juga menuntut pembayaran sisa uang pengganti atas kerugian Negara. Yakni sebanyak Rp 47,4 juta lebih. Dengan subsidair delapan bulan penjara," kata Andi.

Dijelas Andi, adanya tuntutan pembayaran sisa uang pengganti itu karena sebelumnya jaksa sudah melakukan penyitaan uang tunai dari terdakwa sebesar Rp 26,7 juta. Uang tersebut disita sudah jauh hari. Sebagai tindakan pengamanan dugaan kerugian negara. "Penyitaan itu langsung dari terdakwa," jelasnya.

Dengan sudah adanya penyitaan sejumlah uang maka menurutnya terdakwa masih punya kewajiban melunasi pengemba0lian kerugian negara. Kades periode 2013-2019 ini disangkakan melakukan korupsi APBDes Bukit Harapan Tahun Anggaran (TA) 2016 sebesar Rp 730,3 juta dan APBDes TA 2017 total Rp 1,1 miliar.(**hue**)

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS KETAHANAN PANGAN
Jalan Terminal Simpang Nangka Air Meles Atas
CURUP - 39153

Rekap Daftar Harga Bahan Pokok Di Tingkat Pengecer Pasar Atas Curup

1. Bayam	2.500	10. Terong Ungu	3.000	19. Daging Sapi	120.000
2. Bawang Daun	6.000	11. Sawi Manis	3.000	20. Daging Kerbau	120.000
3. Cabe Rawit Hijau	32.000	12. Kol	5.000	21. Ikan Nila	26.000
4. Cabe Merah Besar	35.000	13. Bawang Merah	36.000	22. Ikan Mas	30.000
5. Cabe Keriting	40.000	14. Bawang Putih	23.000	23. Ikan Laut Sarden	26.000
6. Buncis	8.000	15. Kangkung	2.000	24. Ikan Lele	24.000
7. Tomat	5.000	16. Kentang	12.000	25. Telur Ayam Ras	22.000
8. Kacang Panjang	5.000	17. Timun	4.000	26. Daging Ayam Ras	32.000
9. Wortel	5.000	18. Kol Kembang	10.000	27. Beras Premium	10.250

Sembuh Covid-19 Bertambah

CURUP – Kondisi pandemi Covid-19 di Kabupaten Rejang Lebong terus saja meningkat. Meskipun diiringi dengan peningkatan jumlah selesai konfirmasi atau sembuh. Kemarin Gugus Tugas Perepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten RL kembali mencatat kasus baru positif Covid-19 dan selesai konfirmasi alias sembuh.

Dibeberkan Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sekaligus Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten RL Syamsir, S.KM, M.KM kabupaten kemarin, ada tambahan tiga kasus konfirmasi positif baru dan tiga tambahan kasus sembuh. ''Hari ini kembali ada tambaahn tiga kasus baru dan tiga kasus sembuh," sampai Syamsir.

Dirincikan Syamsir, masing-masing konfirmasi positif Covid-19 tambahan yaitu kasus 375 perempuan (18) asal Curup Utara. Lalu kasus 376 laki-laki (70) asal Kecamatan Selupu Rejang dan kasus 377 perempuan (28) asal Kecamatan Curup. Sedangkan selesai konfirmasi alias sembuh tambahan masing-masing kasus 308 asal Kecamatan Selupu Rejang, kasus 309 asal Kecamatan Curup Tengah dan kasus 313 asal Kecamatan Curup Timur.

''Dengan tambahan terbut hari ini (kemarin,red), total konfirmasi positif sebanyak 377 kasus. Kemudian untuk jumlah selesai konfirmasi atau sembuh sudah mencapai 352 kasus. Dan tinggal tersisa konfirmasi positif dalam pengawasan sebanyak 25 kasus. Sedangkan untuk sampel yang diperiksa dilaboratorium sebanyak 1.887 dengan jumlah sampel positif sebanyak 377 dan sampel negatif sebanyak 1.510 kasus," pungkas Syamsir.**(dtk)**

OPERASI: Personel gabungan dari Polres RL melakukan kegiatan operasi pekat nala di warung-warung manisan yang diduga sering menjual miras.

Amankan Ratusan Botol Miras

CURUP – Petugas gabungan Operasi Pekat Nala II Tahun 2020 Polres Rejang Lebong (RL), Senin (14/12) malam berhasil mengamankan ratusan botol diduga minuman keras (Miras) berbagai merk. Miras tersebut diamankan dari beberapa warung manisan di beberapa wilayah kecamatan wilayah hukum Polres RL.

Dirincikan Kapolres RL AKBP Puji Prayitno, S.IK, MH kepada RB kemarin, masing-masing miras yang diamankan yaitu minuman malaga botol besar sebanyak 12 botol. Kemudian malaga botol kecil sebanyak 180 botol dan jenis Beer Frost sebanyak 44 botol. ''Total keseluruhan hasil ops pekat Senin (14/12) malam lalu mencapai 236 botol miras," sampai Kapolres.

Disampaikan Kapolres, miras-miras tersebut didapati di jual di warung milik Na (45) warga Simpang Lebong. Kemudian warung milik Su (38) warga Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup dan warung milik To (39) warga Simpang Lebong. ''Seluruh miras tersebut sudah kita sita dan diamankan di Polres RL. Untuk pemilik sudah kita data dan diberikan pembinaan agar tidak lagi menjual miras dengan membuat surat pernyataan," sampai Kapolres.

Ditambahkan Kapolres, kegiatan operasi pekat ini masih akan dilakukan hingga beberapa hari kedepan. Baik itu oleh petugas gabungan Polres RL maupun polsek jajaran. ''Kegiatan ops pekat nala ini juga dalam rangka pengamanan dan antisipasi menyambut perayaan natal dan tahun baru," demikian Kapolres.**(dtk)**

Adik Kalah Pilbup, Kakak Tutup Jalan

SINDANG KELINGI – Sebagian warga di Kelurahan Beringin Tiga Kecamatan Sindang Kelingi, kemarin terpaksa harus mencari jalan lain menuju arah kebun mereka. Pasalnya jalan yang selama ini dilintasi, ditutup oknum pemilik lahan yang dijadikan jalan beton. Alasannya diduga terkait persoalan pilihan pilkada, karena pemilik lahan merupakan keluarga salah satu paslon kalah di Pilkada RL.

Dijelaskan Kapolres RL AKBP Puji Prayitno, S.IK, MH didampingi Kapolsek Sindang Kelingi Iptu Irwan Saragih, SH kemarin, penutupan dimulai jam 08.00 WIB kemarin oleh oknum kakak paslon kalah. Dimana jalan yang sudah dibeton tersebut lahannya memang milik sang oknum berinisial Uj.

''Warga disana biasa menyebutnya jalan lirik yang digunakan untuk akses menuju kebun masyarakat dan salah satu lokasi aset PDAM Tirta Dharma. Jalan ditutup dengan kayu dan batu serta tumpukan tanah. Dan memang selama ini, jalan tersebut dibangun tanpa ada kesepakatan ganti rugi dari pemerintah, apalagi itu untuk digunakan sebagai fasilitas umum masyarakat," sampai Kapolres.

Namun, sambung Kapolres, penutupan jalan tersebut baru dilakukan setelah pasca pencoblosan dan adik sang pemilik tanah diketahui kalah dalam pilkada. Meskipun pemilik beralasan pihak yang melakukan pembangunan tidak pernah memberitahukan akan dilakukan pembangunan jalan maupun menanyakan status tanah tersebut.

''Kalau alasannya karena tidak ada atau belum ada ganti rugi dari pemerintah. Total lahan jalan milik oknum kaka paslon kalah tersebut sepanjang 120 meter dari jalan aspal. Dari negoisasi sementara hari ini dengan pemilik lahan, mereka kemungkinan akan meminta ganti rugi dulu ke pemerintah. Meskipun informasi dilapangan diduga sebagai dampak kalahnya paslon pilkada yaitu adik si pemilik lahan. Apalagi informasi terakhir anggota kita dilapangan, sebagian masyarakat yang dianggap memilih paslon tersebut masih diperbolehkan leat," imbuh Kapolres.**(dtk)**

DITUTUP: Inilah jalan lirik di Kelurahan Beringin Tiga sebagai akses ke kebun dan aset PDAM yang ditutup lantaran diduga karena dampak pilkada.

Wanda/rb

SERAHKAN: Ketua KPU kabupaten RL Drs. Restu Satrio Wibowo menyerahkan Berita Acara (BA) hasil rapat pleno rekapitulasi perolehan suara Pilkada Gubernur/wakil Gubernur Provinsi Bengkulu di Kabupaten RL kepada saksi masing-masing paslon.

Rohidin-Rosjonsyah Tetap Unggul

CURUP – Rapat pleno terbuka yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rejang Lebong (RL) sejak pukul 09.00 WIB kemarin (15/12) hingga pukul 15.00 WIB, baru menuntaskan untuk rekapitulasi pilkada provinsi atau pilkada gubernur/wakil gubernur saja. Dan hingga tadi malam, rapat pleno masih dilanjutkan untuk rekapitulasi hasil perolehan suara pilkada bupati/wakil bupati.

Dari hasil rekapitulasi tingkat kabupaten kemarin, diketahui Pasangan Calon (paslon) Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu nomor urut 2 Rohidin-Rosjonsyah (RR) masih unggul terhadap dua paslon lainnya, yaitu nomor urut 1 Helmi-Muslihan (HM) dan Nomor Urut 3 Agusrin-Imron (AIR). (lengkap lihat grafis, red).

Dari data hasil paslon RR berhasil menang setidaknya di 9 wilayah kecamatan dari 15 kecamatan Sekabupaten RL. Masing-masing kecamatan Curup, Bermani Ulu dan Selupu Rejang. Kemudian Kecamatan Curup Utara, Curup Tengah, Curup Timur, Curup Selatan, Sindang Dataran serta Kecamatan Bermani Ulu Raya (BUR).

Dijelaskan Ketua KPU Kabupaten RL Drs. Restu Satrio Wibowo kepada RB kemarin, hasil pleno tingkat kabupaten tersebut selanjutnya akan dibawa ke KPU Provinsi Bengkulu. Dimana akan kembali dilaksanakan pleno terbuka rekapitulasi tingkat provinsi. ''Setelah ini, hasil pleno rekapitulasi tingkat kabupaten akan dibawa ke pleno tingkat provinsi," singkat Restu.**(dtk)**

Kecamatan	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3
Kota Padang	2.018	1.768	1.900
PUT	4.381	3.226	2.443
Sindang Kelingi	2.660	2.608	1.673
Curup	4.238	6.627	3.017
Bermani Ulu	1.390	3.634	2.532
Selupu Rejang	6.064	9.336	3.335
Curup Utara	1.900	5.237	3.081
Curup Timur	3.403	6.603	2.634
Curup Selatan	2.874	6.517	2.295
Curup Tengah	5.370	7.343	3.730
Binduriang	1.868	1.752	844
SBU	2.066	1.389	2.601
Sindang Dataran	1.942	2.211	905
SBI	1.490	1.420	1.450
BUR	1.152	3.672	1.669
Total Sementara	42.816	63.343	34.109

Wanda/rb

MUSNAHKAN : Kajari RL bersama Forkopimda melakukan pemusnahan BB dari 20 perkara yang ditangani dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

Kejari RL Musnahkan Sabu, Ganja dan Pil

CURUP – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Rejang Lebong (RL), kemarin pagi menggelar kegiatan pemusnahan barang bukti (BB) dari beberapa perkara tindak pidana yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrach. Pemusnahan dengan cara di bakar dan di potong-potong tersebut dilakukan di depan Kantor Kejari RL dengan disaksikan perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta tamu undangan lainnya.

Adapun BB tersebut masing-masing dari 14 Perkara Narkotika Jenis Shabu dengan berat BB sebanyak 18,75 gram. Lalu dari 3 perkara narkotika jenis ganja dengan berat 563,64 gram dan dari 1 perkara narkotika jenis pil dengan berat 4,77 gram. Serta dari BB 1 perkara undang-undang darurat dan satu perkara lagi dari undang-undang kesehatan.

''Seluruh arang bukti yang perkaranya sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrach ini kita musnahkan hari ini (kemarin, red). Jadi proses pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar untuk BB perkara narkoba dan untuk perkara UU darurat dilakukan dengan cara dipoton-potong menggunakan masin pemotong," sampai Kajari RL Yadi Rachmad Sunaryadi, SH, MH selesai pemusnahan kemarin.

Ditambahkan Kajari, BB tersebut berasal dari 20 perkara berbagai tindak pidana yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Dimaan rata-rata merupakan perkaran pidana narkoba dengan jumlah total sebanyak 18 perkara. ''Rata-rata ini BB dari perkara narkoba yang jumlahnya mencapai 18 perkara dari 20 perkara yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap," imbuh Kajari.**(dtk)**

Iklan Mini **BERDAYA MAKSI**
Tarif MURAH dengan Jangkauan LEBIH LUAS
Tarif Iklan Rp 5.500 per baris. Minimal 3 baris, maksimal 10 baris.
KOTA BENGKULU : GRAHA PENA, Jl. P. Natadirja No. 69 Km 7 Telp (0736) 22060 & (0736)-20882
CURUP : DEPOT KORAN YANTO (samp wrg Kopi Ria), Jl. Merdeka No. 219 Telp (0732) 23516
MANNA : WAHAB ANANG AGENCY, Jl. Jend. Sudirman Simpang Tiga Rukis, Telp (0739) 21407

• JUAL TANAH •
LT 10x20, Lok. Prumnas Pinang Mas, SHM, Hrg Nego. Tanpa Perantara. Hub. 085228004888

• KEHILANGAN •
SERTIFIKAT, Tanah Wakaf No.00001/Tj Agung, NIB 07.06.11.1200002, A/n Drs Buyung Jundran, Almt Desa Tj. Agung Kec. Ulu Talo Kab. Seluma

• KEHILANGAN •
BPKB, Mobil Mitsubishi Maven GLX BD 1027 WY Noka MHMUD1W1V6J000447, Nosin 4G15TB31565 A/N Pemerintah Kab Kaur

• KEHILANGAN •
BPKB, Mobil Suzuki Pick Up Thn 2011 BD 9195 Y Noka MHYGDN41TBJ309415, Nosin G15AID242250 A/N Syahrul

• KEHILANGAN •
BPKB, Mobil Suzuki Jeep Thn 1994 BD 1978 LJ Noka MHDESB16RJ005068, Nosin G1GAID115004 A/N Agusman Ardin

• KEHILANGAN •
BPKB, Mobil Datsun GO+ Thn 2015 BD 1068 CD Noka MHBJ1CH2FFJ, Nosin HR12737562T A/N Baharuddin

• KEHILANGAN •
BPKB, No. I07523032, Noka. MHIJF8114CK473153, BD3781YA, Nosin JF81E-1470476, A/n Anwar Fauzi

ARIE/RB

TUNTAS: KPU Kepahiang menyerahkan Berita Acara (BA) hasil pleno perolehan suara kepada tiga perwakilan Paslon Gubernur-Wakil Gubernur Bengkulu, kemarin (15/12).

PLENO KPU ATAS PEROLEHAN SUARA PILBUP KEPAHIANG

Kecamatan	Paslon 01	Paslon 02
1. Bermani Ilir	4.138	4.465
2. Ujan Mas	6.336	6.085
3. Tebat Karai	3.662	5.121
4. Kepahiang	10.766	14.862
5. Merigi	2.441	3.700
6. Kabawetan	2.988	4.831
7. Seberang Musi	1.301	3.332
8. Muara Kemumu	5.267	6.671
TOTAL SUARA	36.899	49.031

Sah! Dayat-Nata Unggul 12.132 Suara

Hasil Pleno Rekapitulasi Tingkat KPU Kepahiang

KEPAHIANG – KPU Kepahiang telah menyelesaikan pleno rekapitulasi hasil pemungutan suara. Pleno yang rampung pukul 19.30 WIB kemarin (15/12), tak jauh berbeda dengan hasil rekapitulasi di tingkat PPK yang digelar pada akhir pekan lalu.

Untuk pilbup Kepahiang, paslon nomor urut 01 Ujang Syarifudin – Firdaus Djailani (Padek) meraih 36.899 suara. Kalah dari paslon nomor urut 02 Hidayattullah Sjahid – Zurdi Nata (Dayat-Nata) yang mengumpulkan 49.031 suara. Artinya Dayat-Nata berhasil memenangi Pilkada Kepahiang, unggul 12.132 suara dibandingkan paslon 01.

Bila dilihat perolehan suara di delapan kecamatan Kabupaten Kepahiang, pasangan Dayat-Nata berhasil menang di tujuh kecamatan, yakni Bermani Ilir, Tebat Karai, Muara Kemumu, Seberang Musi, Kepahiang, Kabawetan, dan Merigi. Sementara 1 kecamatan lainnya yakni Kecamatan Ujan Mas, suara pasangan Padek lebih unggul dibandingkan paslon 02. (lihat grafis).

Sementara untuk hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bengkulu di Kabupaten Kepahiang, pasangan nomor urut 02 Rohidi Mersyah – Rosjonsyah sangat kokoh dalam perolehan suara di Kabupaten Kepahiang.

Ini terlihat dari hasil rekapitulasi, dimana paslon 02 ini berhasil mendapatkan 40.606 suara, atau selisih 16.310 suara dibanding peraih suara terbanyak kedua, yakni paslon nomor urut 01 Helmi – Muslihan dengan perolehan 24.296 suara. Sementara pasangan nomor urut 03 Agusrin Najamudin – Imron Rosyadi hanya meraih 17.033 suara.

Komisioner KPU Kepahiang, Supran Effendi, S.Sos mengungkapkan, untuk hasil pleno tingkat KPU ini khusus hasil Pilbup Kepahiang, sudah bisa dikatakan sah. Dan akan menunggu apakah nantinya ada gugatan yang dilayangkan oleh paslon yang kalah ke Mahkamah Konstitusi (MK) atau tidak.

"Jika tidak ada gugatan ke MK, maka MK akan mengeluarkan surat register. Selang 5 hari setelah keluarnya register MK, bupati dan wakil bupati Kepahiang terpilih sudah bisa ditetapkan oleh KPU Kepahiang," terang Supran.

Sementara untuk hasil rekapitulasi pilgub, Supran menambahkan, dari Berita Acara (BA) yang disimpulkan atas hasil pleno KPU Kepahiang ini, akan dibawa dalam pleno rekapitulasi hasil pemungutan suara tingkat KPU Provinsi Bengkulu, yang akan digelar beberapa hari kedepan.

"Kalau hasil pilgub, sebagai bahan untuk kita bawa di pleno rekapitulasi tingkat KPU Provinsi Bengkulu beberapa waktu kedepan," ujarnya. **(sly)**

Dua Tersangka Disangkakan Pasal Berbeda

Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan Eks Kantor Camat

KEPAHIANG – Kejari Kepahiang sudah menetapkan dan melakukan penahanan dua tersangka korupsi pengadaan lahan eks kantor Camat Tebat Karai Tahun Anggaran 2015. Kedua tersangka, Ahmad Rizal, selaku penjual tanah dan Agus Supriyanto sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dijerat pasal berbeda. Itu sesuai peran masing-masing tersangka atas terjadinya perbuatan yang merugikan keungan negara.

Kajari Kepahiang, Ridwan Kadir, SH melalui Kasi Pidsus Riky Musriza, SH, MH mengatakan, penerapan pasal ke masing-masing tersangka sesuai dengan hasil ekspose perkara yang dilakukan penyidik sewaktu akan melakukan penetapan tersangka.

Tersangka Ahmad Rizal, penjual tanah sekaligus anggota DPRD Kabupaten Kepahiang periode 2014 – 2019, dijerat dengan sangkaan primair Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Selanjutnya, sangkaan subsidair Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. "Atau sangkaan kedua yakni Pasal 12 huruf i Undang-Undang Tipikor," ujar Riky Musriza.

Sementara untuk tersangka Agus Supriyanto yang berperan sebagai orang yang turut serta atau membantu melakukan tindak pidana, dijerat dengan sangkaan primair Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Subsidair Pasal 3 Undang-Undang Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. "Atau sangkaan primair Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor jo Pasal 56 Ke 1 KUHP. Dengan subsidair Pasal 3 Undang-Undang Tipikor jo Pasal 56 ke-1 KUHP," jelasnya.

Terkait penyidikan lanjutan dan kemungkinan tersangka lain yang terlibat dalam perkara ini, Riky mengatakan penyidik masih menyelesaikan berkasa perkara dari kedua tersangka untuk bisa segera dinaikkan ke jaksa penuntut dan diteruskan pelimpahan perkara ke PN Tipikor Bengkulu. Terlepas nantinya apakah perkara ini akan terus dikembangkan, pihaknya masih perlu melihat fakta-fakta yang muncul di persidangan nantinya. "Ya kita tunggu dulu fakta-fakta apa saja nanti yang terungkap di persidangan. Dari sana, baru bisa kita ketahui kelanjutan perkara ini," demikian Riky. **(sly)**

Smoking Area Batal

Anggaran Daerah Terbatas

KEPAHIANG – Rencana Pemkab Kepahiang tahun 2021 mendatang untuk membangun smoking area di komplek kantor bupati dan gedung DPRD Kabupaten Kepahiang, harus dibatalkan. Ini lantaran kondisi anggaran daerah yang minim, ditambah lagi dengan defisit anggaran yang cukup tinggi di tahun 2020 ini.

Diakui Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kepahiang, Hariyanto, S.Kom. Sebelumnya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mencantumkan usulan pembangunan smoking area di kompleks kantor bupati dan gedung DPRD. Mengingat kemampuan anggaran daerah yang tak memungkinkan, usulan terpaksa ditunda.

"Sebagai gantinya, smoking area kita kembalikan kepada OPD masing-masing. Baik Setda maupun Setwan. Namun itu pun tergantung dengan kemampuang anggaran di masing-masing instansi itu," terang Hariyanto.

Adapun usulan pembangunan smoking area ini, sambung Hariyanto, dalam rangka penerapan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kawasan Bebas Asap Rokok (KBAR). Karena hingga saat ini Perda itu belum sama sekali memberikan dampak signifikan terhadap kebiasaan merokok masyarakat. Khususnya ASN di lingkungan Pemkab Kepahiang dan juga anggota DPRD Kabupaten Kepahiang.

Bahkan rokok belakangan merupakan salah satu komoditi yang paling dibutuhkan masyarakat Kabupaten Kepahiang. Terbukti dari data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepahiang, rokok masuk dalam 3 besar komiditi yang dibutuhkan masyarakat Kabupaten Kepahiang dalam beberapa tahun belakangan ini.

Dalam beberapa tahun terakhir, kebutuhan akan rokok justru lebih tinggi dibandingkan kebutuhan akan umbi-umbian, perikanan, hingga buah-buahan untuk konsumsi masyarakat. Pada tahun 2016, angka konsumsi rokok mencapai Rp 59.991 per kapita per bulan. Di tahun 2017 meningkat menjadi Rp 71.921 per kapita per bulan. Sedikit menurun di tahun 2018 menjadi Rp 71.788 per kapita per bulan.

"Semangat menjalankan perda itu belum ada. Indikasinya seperti masih ada iklan rokok di jalan-jalan protokoler dan di pusat kota seperti pasar. Sementara dalam perda, jelas hal itu dilarang," tukad politisi PKB ini. **(sly)**

Barang Curian Dijual Untuk Game Online

Pengakuan Pembobol Gedung TIC Kepahiang

KEPAHIANG – Satuan Reserse Kriminal Polres Kepahiang, kemarin (15/12) melakukan rekonstruksi kasus pembobolan gedung Tourism Information Centre (TIC) Kepahiang yang terjadi pada dini hari 26 November lalu. Reka ulang langsung diperagakan tersangka OH (18), warga Pasar Kepahiang Kecamatan Kepahiang. Dia mempraktekkan cara ia masuk ke gedung TIC dan mengambil barang-barang berharga.

Diketahui OH sudah 4 kali membobol gedung TIC dalam kurun sepekan, dengan cara yang sama merusak terali jendela samping gedung yang berseberangan dengan gedung DPRD Kepahiang tersebut.

Barang-barang yang berhasil digasak oleh tersangka, monitor komputer sebanyak 3 unit, televisi, kompor gas, speaker aktif, CPU, dan tabung gas elpiji. Barang-barang tersebut dijual tersangka dengan harga murah, total ia mendapat Rp 1,75 juta. Semua uang hasil penjualan barang curian diakui tersangka habis digunakan untuk bermain game online di salah satu waarnet. Dia juga mengaku kecanduan game online hingga nekat melakukan pencurian untuk mendapatkan uang. "Sudah empat kali aku masuk ke situ (gedung TIC, red). Barang-barang itu aku ambil berguyur, kemudian aku jual. Duit hasil jual barang itu aku habiskan main game online," ujar OH saat ditanya RB.

Tersangka yang hanya lulusan SD tersebut mengakui ia terpaksa mencuri karena tidak memiliki pekerjaan dan sudah terlanjut menggilai permainan di game online. "Karena gak ada duit lagi, mau minta sama orang tua, tidak berani, terpaksa aku mencuri," akunya.

ARIE/RB

REKONSTRUKSI: Tersangka pembobolan gedung TIC Kepahiang, OH (18) memperagakan cara ia mencongkel jendela, kemarin (15/12).

Sebelumnya, Kapolres Kepahiang AKBP Suparman, S.IK, M.AP melalui Kasat Reskrim Iptu Welliwanto Malau, S.IK, MH mengungkapkan, penangkapan OH dilakukan pada 11 Desember 2020 lalu berdasarkan hasil penyelidikan pihaknya. Setelah melakukan pemeriksaan beberapa saksi dan alat bukti di lokasi kejadian, maka kesimpulan yang didapat mengarah kepada tersangka OH.

"Awalnya tersangka OH ini akan kita lakukan pemeriksaan sebagai saksi, karena diketahui berada di sekitar TKP sebelum kejadian. Dalam pemeriksaan, tersangka OH justru mengaku dia lah pelaku pencurian, membobol gedung TIC saat kondisi sedang sepi," ungkap Welliwanto.

Saat ini tersangka masih mendekam di sel Polres Kepahiang, guna pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu juga jajarannya melakukan pengumpulan barang bukti yang telah dijual oleh tersangka. Beberapa diantaranya sudah terkumpul dan ikut diamankan.

"Adapun barang bukti hasil curian yang sudah kita dapati kembali, 1 unit TV LED 43 inci, 3 unit monitor komputer, 3 buah tabung gas 3 Kg, 1 unit dispenser dan 1 unit sound system. Sementara untuk barang bukti lainnya, seperti kompor gas dan lainnya, masih kita cari," demikian Welliwanto. **(sly)**

Targetkan Peningkatan Nilai SAKIP Menjadi B

KEPAHIANG – Pemkab Kepahiang menargetkan untuk tahun ini nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (SAKIP) Tahun 2020, harus mendapatkan nilai B. Untuk itu 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi sampel penilaian SAKIP diharapkan mampu melengkapi seluruh dokumen pendukung penilaian.

Adapun OPD yang menjadi sampel penilaian, Bappeda, DPMPTSP, Inspektorat Daerah, Dukcapil, Disparpora, Diskominfo Persandian dan Statistik, Dinkes, Disdikbud dan sejumlah OPD lainnya. Beberapa dokumen yang harus disiapkan oleh OPD sampel tersebut mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan dari sejumlah program yang dijalankan tahun 2020. Dalam waktu dekat tim dari KemenPAN-RB akan melakukan penilaian langsung ke Kabupaten Kepahiang.

Kabag Ortala Setda Kepahiang, Andang Wiharso, S.IP, mengemukakan pihaknya telah menyampaikan surat pemberitahuan kepada 15 OPD supaya bersiap. SAKIP tahun 2020, Pemkab Kepahiang menginginkan adanya peningkatan nilai dari tahun 2019 lalu yang hanya meraih C.

"Tahun 2020 ini target Pemkab Kepahiang mendapatkan nilai B. Karena itu OPD terkait harus bersiap dengan menyediakan segala dokumen yang diminta tim KemenPAN-RB nanti," sampai Andang.

Tim KemenPAN-RB akan melakukan pengecekan terkait dokumen perencanaan, dokumen pelaksanaan yang akan disinkronkan dengan visi-misi kepala daerah. Selain tu juga disinkronkan dengan pembangunan Provinsi Bengkulu serta program nasional. Akumulasi dari hal itulah yang menjadi penilaian untuk Pemkab Kepahiang nantinya. ''Nilai Sakip ini nantinya akan menentukan apakah sejumlah program yang dijalankan tahun 2020 mengalami peningkatan atau tidak, dari sejumlah item yang menjadi penilaian," pungkas Andang.(sly)

LINTAS

Seluruh Penerima Bantuan Modal, Sudah Serahkan LPj

BENTENG - Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi (Disperindagkop) dan UKM Bengkulu Tengah (Benteng) mengklaim jika semua pelaku usaha yang menerima bantuan usaha modal sudah menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPj). Selain itu dalam LPj yang sudah diserahkan, tidak ada kesalahan dan semuanya sudah diterima.

Plt Kepala Disperindagkop dan UKM Benteng, Edward Novrin melalui Kepala Bidang (Kabid) Koperasi Disperindagkop dan UKM, Mimi Noviarti menjelaskan, sebanyak 239 pelaku usaha yang diberikan modal usaha, saat ini semuanya sudah menyerahkan LPj kepada pihaknya. 239 pelaku usaha tersebut terdiri dari 100 UKM, 100 IKM, 12 Koperasi, 27 kelompok perempuan produktif.

"Setelah kita lakukan pemeriksaan LPj yang mereka serahkan kepada kita, semuanya sudah benar dan tidak koreksi maupum kesalahan. Sehingga semua LPj mereka sudah selesai dan peruntukkan bantuan modal usaha yang diberikan sudah sesuai dengan peruntukkan yang mereka buat dalam RAB," ungkapnya.

Dia menambahkan, Total bantuan yang diberikam untuk para pelaku usaha yang dinaungi oleh Disperindagkop dan UKM berkisar Rp 1 miliar. Bantuan modal usaha tersebut diberikam kepada ke UKM sebesar Rp 200 juta, untuk IKM sebesar Rp 200 juta, kemudian untuk Koperasi sebesar Rp 120 juta dan untuk kelompok perempuan produktif sebesar Rp 480 juta.

"Setelah beberapa waktu lalu kita melakukan pemantauan kepada setiap pelaku usaha, memang para pelaku usaha yang menerima bantuan ini merasa sangat terbantu. Sebab dengan adanya bantuan modal usaha ini, mereka kembali bisa menghidupkan kembali usaha mereka yang sempat terdampak dikarenakan adanya wabah covid 19 yang melanda Kabupaten Benteng," Tutup Mimi.(**jee**)

Tak Tertib, Puluhan Kades Belum Lunasi PBB

BENTENG - Badan Keuangan Daerah (BKD) Bengkulu Tengah (Benteng) mengklaim hingga saat ini masih ada kepala desa (Kades) yang belum membayar pajak PBB. Hal ini membuktikan jika kepatuhan dan tertib dalam membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB) tidak ditunjukkan oleh sejumlah kades di wilayah Kabupaten Benteng.

Kepala BKD Benteng, Welldo Kurniyanto, SE, MM melalui Kabid PBB dan BPHTB, Febriansyah, A.Ks, MM menjelaskan, jika puluham Kades yang belum melakukan pembayaran pajak PBB ini tersebar di beberapa Kecamatan, seperti di Kecamatan Karang Tinggi, Pematang Tiga, Bang Haji dan Pagar Jati.

"Memang hingga saat ini masih ada kades yang belum lunas melakukan pembayaran PBB dan tersebar hampir di seluruh Kecamatan. Namun memang yang lebih dominan terdapat empat kecamatan tersebut," ujarnya.

Febriansyah menambahkan, dengan masih adanya Kades yang belum melakukan pembayaran pajak PBB ini, pihaknya melalui petugas penagih telah berupaya untuk melakukan penagihan. Namun kades yang bersangkutan meminta adanya pendataan ulang wajib pajak maupun objek pajak. Diketahui objek pajak yang dimaksud berupa tanah ataupun bangunan seperti rumah.

"Alasan mereka selain belum mau membayar, ada juga kades yang meminta dilakukan pendataan ulang terhadap objek pajaknya," tegasnya.

Lanjutnya, secara global jumlah PBB saat ini telah mencapai Rp 2,3 miliar. Melebihi target yang ditetapkan tahun ini sebanyak Rp 1,9 miliar. Terbesar di Kecamatan Merigi Sakti lantaran terdapat PLTA Musi di Desa Susup. (**jee**)

Warga 3 Desa Terima Bansos

BENTENG – Polres Bengkulu Tengah (Benteng), kembali memberikan bantuan sosial (bansos) kepada warga. Jika sebelumnya sudah membagikan bantuan sosial (bansos) berupa beras ke warga di dua desa, kemarin (15/12) Polres Benteng melalui Polsek Talang Empat kembali melakukan penyaluran bantuan ke 3 desa lainnya.

Kapolres Benteng, AKBP. Ary Baroto, S.Ik, MH melalui Kapolsek Talang Empat AKP. Radian Andy Pratomo, S.Ik mengatakan, pihaknya kembali melakukan penyaluran bansos terhadap tiga desa seperti Desa Air Sebakul, Desa Air Putih dan Desa Jayakarta. Disetiap masing-masing desa pihaknya membagikan berbeda-beda sesuai warga yang memang layak mendapatkan bantuan.

"Sepeeti Desa Air Sebakul sebanyak 35 warga, Deaa Air Putih sebanhak 14 warga dan terakhir Desa Jayakarta sebanyak 11 warga. Dengan bantuan ini kita sangat juga berharap bantuan tersebut dipergunakan dalam memenuhi dan meringankan beban masyarakat dalam situasi pandemi covid 19 saat ini," jelasnya.

Dia menambahkan, bantuan ini diberikan kepada masyarakat merupakan kepedulian dari Polres Benteng untuk masyarakat tidak mampu.(**jee**)

JERI/RB

PLENO: Para saksi dan PPK memeriksa dan memastikan kotak suara dan amplop surat suara masih dalam kondisi tersegel.

Gaji Naik, 249 Perangkat Desa Gadai SK ke Bank

Total Pinjaman Tembus Rp 13,4 M

BENTENG - Dari data yang didapatkan dari Bank Bengkulu Cabang Karang Tinggi Bengkulu Tengah (Benteng) diketahui hingga saat ini sudah 249 Perangkat Desa yang pengajuan pinjamannya sudah disetujui dan dicairkan. Kemudian untuk total anggaran yang dikeluarkan Bank Bengkulu terkait pinjaman dari 249 perangkat desa tersebut berkisar Rp 13,4 milliar.

Hal ini diungkapkan langsung oleh Kabag Pemasaran dan Kredit, Bank Bengkulu Cabang Karang Tinggi Benteng, Rika Rosita SH. Ia menjelaskan untuk total keseluruhan perangkat desa yang sudah disetujui dan dicairkan pengajuan pinjaman uang kepada Bank Bengkulu sebanyak 249 orang. Dari jumlah tersebut tersebar di tiga cabang Bank Bengkulu yang ada sk Benteng.

"Seperti Bank Bengkulu Cabang Karang Tinggi, Bank Bengkulu Cabang Pembantu Taba Penanjung dan Bank Bengkulu Cabang Pembantu Pondok Kelapa. Kemudian dari 249 yang pengajuan pinjamannya sudah sudah disetujui tersebut, total anggaran yang sudah dikeluarkan sebanyak 13,4 milliar. Data ini merupakan data per bulan November," ungkapnya.

Dia menambahkan, untuk nominal pinjaman yang perangkat desa ajukan bermacam-macam, seperti pinjaman nominal Rp 25 juta. Namun untuk nominal pinjaman Rp 25 juta masih sedikit karena memang kebutuhan mereka yang lebih dari itu, seperti kebutuhan pendidikan anak, dan renovasi rumah.

"Kebanyakan mereka meminjam di atas angka Rp 25 juta seperti 50 juta atau rata-rata diangkat Rp 65 juta hingga 69 juta. Untuk pinjaman di atas Rp 50 juta memang ada persyaratan tambahan yang harus mereka lampirkan, seperti sertifikat dan BPKB kendaraan mereka," jelasnya.

Lanjutnya, untuk jumlah perangkat desa yang akan mengajukan peminjaman uang ke Bank Bengkulu ini akan terus bertambah, karena semua ini dilihat dari antusias perangkat desa yang lumayan tinggi dalam mengajukan pinjaman ke Bank Bengkulu beberapa bulan terakhir ini. Selain itu juga, Bank Bengkulu juga memberikan pelayanan bunga yang rendah terhadap perangkat desa.

"Kita juga memberikan kepada mereka apabila meminjam uang kepada kita, sebab kita memberikan bunga yang rendah kepada mereka. Kemudian proses pencairan juga cepat dan persyaratan yang dibutuhkan hanya SK perangkat desa yang bersangkutan Sehingga ini menjadi daya tarik mereka untuk mengajukan pinjaman kepada kita Bank Bengkulu," pungkasnya.

Untuk diketahui, saat ini memang perangkat desa berbondong - bondong mengajukan pinjaman ke setiap Cabang Bank Bengkulu yang ada di Benteng, hal ini dikarenakan setelah penghasilan tetap (Siltap) naik dan sudah memperoleh Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD). (**jee**)

Unggul Tipis, HM Menang di Benteng

BROTOSENO

BENTENG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bengkulu Tengah (Benteng), kemarin (15/12) melaksanakan pleno tingkat Kabupaten ysng bertempat di aula hotel Puncak Tahura. Dalam pleno yang digelar tersebut diketahui jika pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Helmi-Muslihan (HM) tetap unggul dibandingkan dengan paslon nomor urut 2 Rohidin -Rosjonsyah dan paslon nomor urut 3 Agusrin - Imron.

Menariknya, keunggulan Helmi-Muslihan itu hanya selisih tipis 18 suara saja. Hal ini dikarenakan Ketua KPU Benteng, Drs, Brotoseno. "Dari hasil pleno diketahui jika paslon nomor urut 1 mendapatkan suara 22.571, sedangkan paslon nomor urut 2 mendapatkan suara sebanyak 22.553 dan disusul paslon nomor urut 3 dengan mendapatkan suara13.418. Sehingga total suara sah yang di Kabupaten Benteng berjumlah 58.542 suara dan suara tidak sah sebanyak 2.361," jelasnya.

Dia menambahkan, untuk total keseluruhan partisipasi masyarakat Benteng yang menyalurkan hak suaranya berjumlah 60.903 suara. Jika dibandingkan dengan total DPT sebanyak 83.350, maka total masyarakat yang tidak menyalurkan hak suaranya dalam Pilgub 2020 ini sebanyak 22.447 orang.

"Dalam pleno tingkat Kabupaten ini alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, karena semua permasalahan hang ada sudah diselesaikan dipleno tingkat Kecamatan. Persoalan seperti terjadi kekurangan suara di TPS karena dalam penyaluran logisitik ada yang tertukar," ungkapnya.

Lanjutnya, dalam pleno Kabupaten Benteng kali ini, memang sanksi dari paslon nomor urut 3 tidak hadir, namun tidak ada masalah dan pleno tetap dilanjutkan. "Kemudian sanksi dari paslon nomor urut 3 juga tidak ada konfirmasi kepada pihak KPU Benteng mengapa mereka tidak hadir dalam pleno Kabupaten ini," Pungkasnya. (**jee**)

Hasil Seleksi Honorer Diumumkan Akhir Tahun

BENTENG - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng), diketahui saat ini sudah mulai kembali untuk melakukan seleksi rekrutmen calon honorer untuk tahun 2021 mendatang. Dalam tahapan seleksi ini, diikuti para calon tenaga honorer Satpol PP sebanyak 150 orang dengan mengikuti dua tahapan tes, yang terdiri dari tes fisik dan tes tertulis. Selain itu untuk hasil seleksi para calon tenaga honorer Satpol PP ini ditargetkan akhir Desember sudah diumumkan

Kepala Bidang (Kabid) Sumber Daya Aparatur (SDA) Satpol PP Benteng, Erni, S.Sos mengungkapkan, tahapan seleksi ini sudah digelar sejak (14/12) tahapan seleksi tes fisik dan (15/12) tahapan tes tertulis. Untuk tahapan tes tertulis dengan rincian 15 soal pilihan ganda dan 5 essay, dengan dikerjakan dalam waktu 60 menit. Tes tertulis dilaksanakan dengan tiga sesi, dengan rincian sesi pertama pukul 08.00 WIB, sesi kedua 09.00 WIB dan terakhir pukul 10.00 WIB.

JERI/RB

TERTULIS: Para peserta calon honorer Satpol PP melaksanakan tes tertulis kemarin.

"Calon tenaga honorer pada tahun 2021 mendatang, kita hanya membutuhkan 130 tenaga honorer. Sehingga dari jumlah 150 tenaga honorer pada tahun ini, maka dapat dipastikan akan ada 20 orang yang dinyatakan gugur. Pada tahun 2021 mendatang untuk tenaga honorer kita mengalami pengurangan, sebab pada tahun ini ada 150 tenaga honorer dan ditahun depan hanya dibutuhkan 130 tenaga honorer," ungkapnya.

Dia menambahkan, dengan adanya pengurangan tenaga honorer ini, maka pihaknya akan benar-benar melakukan seleksi dengan ketat. Penilaian untuk memilih 130 tenaga honorer ini akam dilihay dari hasil tes fisik, hasil tes tertulis dan hasil evaluasi kerja yang telah dilaksanakan tenaga honorer selama satu tahun ini.

"Apabila selama satu tahun ini mereka bekerja maksimal, maka akan mendapatkan nilai plus. Akan tetapi apabila selama satu tahun ini tidak bekerja maksimal, jarang sekali masuk dan tidak melaksanakan tugas sesuai yang diperintahkan, maka akan menjadi nilai minus untuk peserta itu sendiri. Jadi mulai dari kedisiplinan, kepatuhan, kinerja keseluruhan itu menjadi pertimbangan kita. Apakah honorer bersangkutan bisa diterima kembali pada tahun depan atau tidak," tegasnya.

Lanjut Erni, setelah diumumkan, bagi peserta yang dinyatakan lulus akan langsung melaksanakan pemberkasan. Sehingga pada bulan Januari tenaga honorer yang dinyatakan lulus sudah bisa bekerja seperti biasanya. Untuk diketahui dari 150 peserta calon tenaga honorer Satpol PP ini semunya berasal dari 150 tenaga honorer yang lama dan tidak ada calon peserta yang baru mendaftar.

"Agar semua tenaga honorer kita bisa bekerja dengan maksimal, pada tahun 2021 mendatang kita akan melaksanakan evaluaso setiap tiga bulan sekali. Jadi apabila ada tenaga honorer yang tidak bekerja dengan maksimal dan bekerja tidak sesuai aturan, maka yang bersangkutan akan langsung digantikan dengan tenaga honorer yang baru," jelasnya.

Sambungnya, Tahapan seleksi tes fisik sudah dilakukan kepada setiap calon tenaga honorer. Tes fisik perlu dilakukan karena untuk melihat kemampuan fisik para calon tenaga honorer ini. "Sebab di Satpol PP ini kita membutuhkan tenaga dan fisik yang kuat, karena kerja kita lebih banyak dilapangan dari didalam kantor. Selain itu juga untuk penjagaan disejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau rumah dinas," Tutup Erni. (**jee**)

JERI/RB

RAZIA: Tim Satgas usai memberikan masker kepada pelajar dan memberikan peringatan agar tidak lagi melanggar protokol kesehatan.

12 Pelaku Usaha dan Tujuh Warga Melanggar Prokes

BENTENG - Tim satuan tugas (satgas) Covid-19 Bengkulu Tengah (Benteng) diketahui sejak Jumat (11/12) hingga Senin (14/12) , terus gencar melaksanakan razia yustisi penegakan peraturan bupati (Perbup) nomor 37 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan (prokes) di tempat wisata dan pelaku usaha.

Semua ini dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid 19 yang ada di Kabupaten Benteng. Dari empat kali dilaksanakannya razia tersebut terdapat 12 pelaku usaha dan 7 warga dikenakan sanksi sosial. Kepala Satpol PP Benteng sekaligus menjabat sebagai Ketua Tim Satgas Covid-19 Benteng, Gunawan R, SE, MM mengatakan, kalau sasaran razia kali ini kepada pelaku usaha, objek wisata, perusahaan maupun Perbankan termasuk para pengunjung, nasabah ataupun pekerja.

Setelah tim satgas mendatangi setiap titik sasaran razia, ditemukan beberapa yang tidak patuh prokes. Beberapa pelaku usaha lain disekitar kawasan terkena sanksi sosial. "Untuk razia dilaksanakan pada Jumat (11/12) kita lakukan dikawasan Desa Kembang Seri dengan mendatangi Indomaret, PT. Bengkulu Angkasa Makmur (BAM), PT. BRI dengan ditemukan 2 pelaku usaha yang disanksi. Sabtu (12/12) di kawasan Kecamatan Pondok Kelapa seperti wisata Danau Gedang ditemukan 1 masyarakat disanksi," jelasnya.

Gunawan menambahkan, kemudian pada hari Minggu (13/12) dikawasan wisata Sungai Suci dan Wahana Surya dan sekitarnya terdapat 8 pelaku usaha yang dikenakan sanksi. Terakhir Senin (14/12) dikawasan Wahana Surya dan Sungai Suci dan sekitarnya ditemukan 2 pelaku usaha serta 6 masyarakat yang disanksi.

"Sanksi yang kita berikan kepada pelanggar seperti, sanksi sosial mulai dari push up, lari-lari kecil, membersihkan sampah dan lainnya. Hal ini dilakukan dengan harapan memberikan efek jera agar masyarakat tidak mengulangi pelanggaran prokes. Hingga saat ini belum ada kita berikan sanksi denda bagi pelanggar, karena mereka menyanggupi untuk diberikan sanksi sosial," ungkapnya.

Bukan tidak mungkin ke depannya akan diberikan denda sanksi bagi pelanggar yang sudah terdata oleh tim satgas. "Sebab apabila para pelaku usaha, wisata dan warga yang sudah didata dan masih melanggar maka akan dikenakan sanksi denda seperti yang ada di Perbup, seperti denda Rp 100 ribu bagi warga dan Rp 500 ribu bagi pelaku usaha dan wisata," tegasnya.(**Jee**)

LINTAS

MAZWAR

BPN Sukses Jalankan PTSL di Masa Pandemi

BENGKULU - Di tengah pandemi virus korona (Covid-19) Kementerian ATR/BPN provinsi Bengkulu tetap berupaya untuk menyelesaikan pendaftaran seluruh bidang tanah di Indonesia pada tahun 2025. Program prioritas nasional yaitu program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dilaksanakan sesuai protokol pencegahan dan penanganan virus Covid-19 dalam pelaksanaannya.

Kakanwil BPN Provinsi Bengkulu Mazwar, SH, M.Hum mengatakan, tahun ini penyesuaian target akibat adanya keterbatasan ruang gerak karena protokol pencegahan dan penanganan Covid-19 serta realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19. "Dari 33 Kanwil BPN Provinsi Se Indonesia, Bengkulu mendapat program PTSL tahun ini sukses 100 persen," katanya.

Ia juga menuturkan bahwa BPN Provinsi Bengkulu juga telah mendapatkan peringkat 1 Nasional baik dari kualitas dan kuantitas program PTSL yang berjalan selama ini di masa pandemi. Pegawai yang terjun ke lapangan di beberapa daerah yang sudah zona merah, harus tetap patuh terhadap protokol Covid-19.

"Kondisi di lapangan juga itu kan ada pembatasan ruang masyarakat, jadi protokol Covid-19 di lapangan tetap harus kita laksanakan, jadi tidak boleh mengumpulkan orang. Pegawai yang turun ke lapangan juga sangat dibatasi, mau ukur dibatasi, mau ambil data masyarakat dibatasi," jelasnya.

Selain mengupayakan pendaftaran tanah dengan menggunakan protokol Covid-19 yang ketat, guna mendukung tetap bergeraknya dunia usaha, memberikan relaksasi terhadap pelayanan penetapan hak atas tanah.

Diketahui bahwa setidaknya Kementerian ATR/BPN sudah mulai membuat program baru dalam rangka merespon kebutuhan publik, baik dengan melakukan harmonisasi aturan internal, membangun sistem berbasis online dan digital, mendukung percepatan pembangunan tanah secara nasional, tata kelola kearsipan yang lebih baik, penyediaan ruang simpan dan daftar arsip yang terukur, menuju e-office, dan sloka etnik.

Sebelumnya program PTSL terhambat oleh adanya wabah virus corona. Dampaknya, sebagian besar jadwal pengukuran data di lapangan pun sempat ditunda. "Untuk saat kini kegiatan PTSL tidak ada hambatan, pengukuran tanah di sebagian besar wilayah tetap dilaksanakan sesewai dengan prokes. Termasuk pengumpulan data dan sosialisasi bersama warga dilakukan sejak pertengahan Maret," ujarnya.

Ia melanjutkan, ada beberapa tahapan yang harus dilalui apabila masyarakat ingin melalukan sertifikasi tanahnya. Pada tahap awal, petugas akan melakukan pengukuran tanah di lapangan sesuai dengan yang telah didaftarkan. "Program pembagian PTSL bagi warga adalah sebagai bukti kepemilikan bidang tanah yang sah, jadi tolong di rawat agar tidak hilang," pungkasnya (**hkm**)

Rayakan Nataru, jangan Ada Kerumunan

BENGKULU – Pada Selasa (13/12) pagi, Polda Bengkulu menggelar latihan pra OPS Lilin Nala 2020 yang di laksanakan di Aula Command center Polda Bengkulu. Ini dilaksanakan untuk merencanakan kesiapan pengamanan di Provinsi Bengkulu.

Kabid Humas Polda Bengkulu Kombes Pol Sudarno, S.Sos, MH mengatakan, kegiatan dipimpin Karo OPS Polda Bengkulu dan diikuti oleh Kabag Ops Polres jajaran. "Sehingga nanti pada saat kegiatan semuanya berjalan lancar dan tidak ada kendala," jelas Sudarno.

Dibeberkan Sudarno, dalam pengamanan nanti pihaknya juga akan menyiapkan pos pengamanan baik itu di tempat ibadah, tempat keramaian dan jalur lintas antar kabupaten dan provinsi. Sudarno juga mengimbau, agar masyarakat dalam merayakan Natal dan tahun baru (Nataru) untuk tidak berkerumun serta mematuhi protokol kesehatan (prokes) mengingat saat ini masih dalam masa pandemi untuk mencegah penyebaran virus covid–19.

"Sebaiknya rayakan saja bersama keluarga di rumah, jika terpaksa harus keluar rumah patuhi prokes dan jangan berkerumun," imbau Sudarno. (**zie**)

IST/RB

RAPAT: Polda Bengkulu saat melaksanakan rapat Pra Ops Lilin Nala di ruang Command Center Polda Bengkulu, Selasa (13/12).

Penyakit Penyerta Covid-19 Perlu Diwaspadai

BENGKULU - Penyakit Covid-19 lebih berisiko bagi orang yang sebelumnya mengidap penyakit dalam istilah medis disebut Komorbid. Pasien yang memiliki Komorbid ini lebih memerlukan perhatian karena kondisinya lebih rentan sehingga ketika tertular Covid-19 bisa berdampak fatal.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu Susilawati mengatakan, beberapa penyakit penyerta Covid-19 yang paling banyak pada pasien positif Covid. Ada lima di antaranya adalah hipertensi, diabetes, penyakit jantung, penyakit paru, dan penyakit ginjal. "Orang yang telah memiliki penyakit ini harus lebih ketat menerapkan protokol kesehatan demi menghindari penularan Covid-19," katanya.

Ia juga mengatakan, orang-orang yang memiliki penyakit penyerta sebaiknya lebih memperhatikan dirinya. Contohnya dengan selalu menjaga gaya hidup sehat serta terus rutin menjalani pengobatan. "Tentu tanpa lupa menerapkan protokol kesehatan, terutama ketika beraktivitas di luar rumah," ucapnya.

Komorbid atau penyakit penyerta dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh sehingga dapat membuat virus semakin merajalela merusak organ. Pada kasus yang fatal, maka dapat menyebab kerusakan organ yang berujung pada kematian.

Ia menjelaskan kondisi hipertensi dan diabetes akan memperparah pasien karena dua penyakit ini berhubungan dengan seluruh organ tubuh. "Jadi, kalau orang sakit hipertensi itu, memudahkan timbulnya stroke, jantung, gagal ginjal. Ada banyak organ tubuh yang rusak karena darah tinggi," jelasnya.

Penyakit komorbit tersebut merupakan penyakit tidak menular dengan jumlah penderita yang terus meningkat setiap tahun. Dua penyakit ini tak bisa disembuhkan tapi bisa dikontrol dengan perawatan. "Penyakit ini merupakan komorbid atau penyakit penyerta yang meningkatkan risiko kematian pasien corona," paparnya

Kondisi penyakit komorbit ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti usia, genetik, dan juga gaya hidup yang tidak sehat. Pola makan tinggi gula, garam, lemak, serta tidak berolahraga menjadi faktor risiko hipertensi dan diabetes. Merokok, konsumsi alkohol, obesitas, dan stres juga meningkatkan risiko terkena hipertensi dan diabetes, jadi harus tetap diwaspadai. (**hkm**)

5 PENYAKIT PENYERTA YANG DITEMUI PADA PASIEN COVID

- Penyakit Hipertensi (Darah tinggi)
- Diabetes
- Penyakit jantung
- Penyakit paru
- Penyakit ginjal

Prioritas Target Vaksin Covid, Tunggu Instruksi Pusat

HERWAN ANTONI

BENGKULU - Sampai sejauh ini, Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Bengkulu belum mendapatkan pemberitahuan resmi dari pemerintah pusat berkaitan dengan rencana vaksinasi corona virus disease 2019 (Covid-19). Termasuk juga, belum diketahui siapa nanti yang diprioritaskan akan diberikan vaksin lebih dahulu.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Bengkulu, H. Herwan Antoni, SKM, M.Kes menyampaikan jika pihaknya memang belum mendapatkan informasi resmi dari pusat berkaitan dengan vaksin covid-19 tersebut. "Sampai saat ini belun tahu ya. Yang jelas kita sesuai dengan petunjuk pusat sajalah. Karena sampai saat ini pusat belum menyampaikan surat resmi ke daerah atau ke provinsi," ungkap Herwan.

Kendati demikian, kata Herwan, dari informasi yang diterima pihaknya dari berbagai sumber seperti media, ada beberapa yang nanti akan menjadi prioritas untuk divaksin lebih dulu. "Informasinya, kalau kita dengar di berita-berita, bahwa ada prioritas dulu karena ini bertahap. Prioritasnya itu kan tenaga kesehatan, karena mereka yang menangani covid-19," jelasnya.

Kemudian, personil TNI-Polri, dan tenaga-tenaga yang melayani pelayanan publik. "Pelayanan publik banyak. Yang kontak langsung dengan masyarakat, baik di kabupaten dan kota," tambahnya.

Herwan juga selalu mengimbau agar masyarakat selalu mematuhi protokol kesehatan. (**zie**)

Masa Pandemi, Layanan Dukcapil Tetap Maksimal

BENGKULU - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu tetap berkomitmen penuh dalam pelayanan kepada masyarakat selama masa pandemi Covid 19 ini. Protap pelayanan yang dijalankan mengikuti ketentuan dan Protokol layanan kesehatan, antara lain pelayanan reguler melalui *online* (WA) dan Dinas Dukcapil akan memprosesnya sehingga pemohon tinggal mengambil dokumen yang sudah jadi.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Bengkulu, M. Ikhwan SH MH mengatakan, Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) menjadi salah satu pelayanan penting yang selalu dibutuhkan masyarakat termasuk pada masa pendemi seperti ini.

"Beberapa pemerintahan kabupaten kota se- Provinsi Bengkulu terus mengupayakan pelayanan prima dengan berbagai inovasi yang mendukung optimalnya pelayanan Adminduk sesuai prosedur pencegahan Covid-19," katanya.

Masa pandemi Covid-19, tak menyurutkan langkahDukcapil dalam memberikan pelayanan kepada warga Provinsi Bengkulu. Guna menghindari penyebaran virus corona maka pelayanan dimaksimalkan secara daring atau online sampai dengan akhir tahun.

Pelayanan Administrasi Kependudukan di masa pandemi Covid-19 tetap melayani pelayanan, tetapi lebih banyak melalui daring, website, whatsApp, facebook.(**hkm**)